

PENGARUH DIMENSI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TERHADAP KINERJA KEUANGAN

(Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Disusun Oleh :

NANDA NURASTIKHA

165020201111029

SKRIPSI



KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Mayjen Haryono No 165 Malang Indonesia

Telp. +62341-555000 (Hunting) 551396, 553834 Fax. 553834

E-mail: info@fe.Unibraw.ac.id Website :http://feb.ub.ac.id

FORM A
KPS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Menyatakan Judul Skripsi :

Pengaruh Dimensi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan
(Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)

Judul Skripsi (Inggris):

The Influence Of Good Corporate Governance's Dimention Towards Company Financial
Performance
(Study on Banking Companies listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2014-2018)

Nama : Nanda Nurastikha
NIM : 165020201111029
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Juli 1998
Ujian Komprehensif Ke : 1 (Satu)
IPK (selain Nilai Skripsi) : 3,65
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Format Ujian : REVIEW SKRIPSI / DARING - BBB

Mengetahui,

Malang, 17 Juni 2020
Menyetujui,

Ketua Program Studi Sarjana Manajemen

Dosen Pembimbing,

(Dr. Siti Aisjah, SE, MS, CSRS, CFP)

(Kusuma Ratnawati, SE., MM., CFP)

Keterangan:

1. Dikirimkan Kepada Dosen Pembimbing dan KPSSM dalam format pdf.
2. KPSSM – HP. 08123252102 email: aisjahsiti@gmail.com





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan MT. Haryono 165 Malang 6541, Indonesia
Telp. +62341-555000 (Hunting), 551396, Fax.553834
E-mail : feb@ub.ac.id <http://www.feb.ac.id>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini , saya :

N a m a : Nanda Nurastikha

Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 18 Juli 1998

Nomor Induk : 165020201111029

Jurusan : S-1 Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Alamat : Jalan Beton No. 42 Jakarta Timur

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa **SKRIPSI** berjudul :

PENGARUH DIMENSI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018)

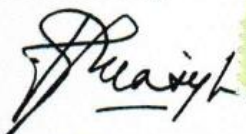
yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

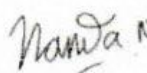
Malang,

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Dr. Kusuma Ratnawati, SE., MM
NIP. 19610923 200604 2 001



Yang membuat pernyataan


Nanda Nurastikha
NIM. 16502020111129

KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemampuan kepada saya untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul: “Pengaruh Dimensi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018).

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam meraih Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Saya menyadari bahwa aktivitas penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik karena dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, Saya merasa berkewajiban menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Drs. Nurkholis, S.E., M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
2. Dr. Sumiati, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Dr. Siti Aisjah, SE., MS., CSRS. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
4. Dr. Kusuma Ratnawati, SE., MM. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan waktu bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

5. Risna Wijayanti, SE., MM., ph.D. selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, dan arahan demi perbaikan skripsi yang lebih baik lagi.

6. DR. Himmiyatul Amanah J.J., SE., MM. selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, dan arahan demi perbaikan skripsi yang lebih baik lagi.

7. Kedua Orang tua dan adik saya yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat serta waktu dan tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi melalui skripsi ini.

8. Ka Isan yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi hingga selesai

9. Mega dan Nathasia yang selalu ada dari pada saat mahasiswa baru hingga semester akhir

10. Ainy, Novka, dan Hani yang selalu memberi saran dan semangat dalam penyusunan skripsi

11. Angel, Decyn, Inan, Saskia, Vero, Debby yang selalu menjadi moodbooster dari SMA

12. Hana, Aul, dan Grace yang menemani pada saat magang dan menjadi teman baik hingga sekarang

13. Aca dan Shali yang menemani pada saat magang dan menjadi teman baik hingga sekarang

14. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan banyak dukungan atas penyelesaian laporan skripsi ini. Saya akhiri kata pengantar ini dengan harapan semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak. Terima kasih.

Jakarta, 15 Juni 2020

Nanda¹⁰

Nanda Nurastikha



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nanda Nurastikha

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Juli 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jalan Beton No. 42 Jakarta Timur

Alamat di Malang : Jalan Simpang Semanggi Timur No. 15

No HP : 081316484225

E-mail : Nandanuras18@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Furqan Jakarta (2002-2004)
2. SDN 03 Pagi Jakarta (2004-2010)
3. SMP N 74 Jakarta (2010-2013)
4. SMA N 21 Jakarta (2013-2016)
5. Strata 1 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya (2016-2020)

Pengalaman Organisasi dan Kepanitiaan

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya – Staff Magang SDM (2016)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya – Staff Tetap Marketing and Entrepreneur (2016-2017)
3. Management Cup – Staff Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi (2016)

4. Viva Management – Staff Humas (2017)

5. Masuk Kampus Chapter Malang – Staff Reporter dan Social Media

6. International Village Volunteering Program – Volunteer Delegation To
Malaysia (2018)

7. Management Edutainment – Staff Liaison Officer (2018)





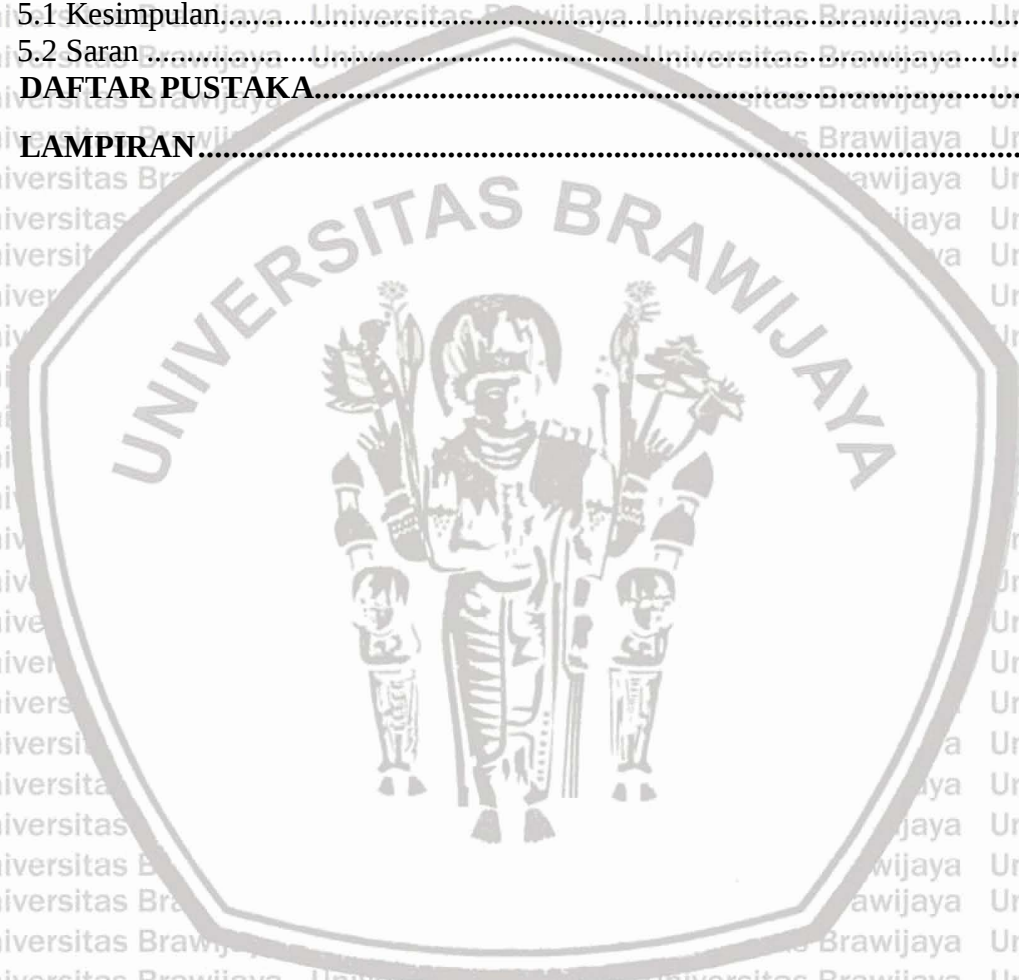
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	xiv
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Kajian Teori.....	13
2.1.1 Teori Agensi	13
2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i>	15
2.1.3 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.1.4 Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	20
2.1.5 Indikator <i>Good Corporate Governance</i>	20
2.1.5.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen	20
2.1.5.2 Struktur Kepemilikan	22
2.1.4.3 Komite Audit.....	25
2.1.6 Kinerja Keuangan Perusahaan.....	26
2.1.6.1 Definisi Kinerja Keuangan	26
2.1.6.2 Pengukuran Kinerja Keuangan.....	27
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Penelitian.....	34
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
2.4 Kerangka Konseptual.....	36
2.5 Konsep Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
31 Jenis Penelitian.....	43
32 Populasi dan Pengambilan Sampel	43
3.2.1 Populasi	43
3.2.2 Sampel	43
3.3 Sumber Data	47
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data	47
34 Definisi Operasional.....	48
3.4.1 Variabel Dependen.....	48
3.4.2 Variabel Independen	49
1. Proporsi Dewan Komisaris Independen (X1).....	49



2. Kepemilikan Institusional (X2)	50
3. Kepemilikan Manajerial (X3)	50
4. Komite Audit (X4)	51
3.5 Metode Analisis Data	51
3.5.1 Statistik Deskriptif	51
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	52
3.5.2.1 Uji Normalitas	52
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas	52
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	52
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda	53
3.5.4 Uji F (Uji <i>Goodness of Fit</i>) dan Koefisien Determinasi (R^2)	54
3.5.4.1 Uji F (Uji <i>Goodness of Fit</i>)	54
3.5.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)	55
3.5.5 Uji Hipotesis	56
3.5.5.1 Uji <i>t</i>	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	58
4.1.1 PT. Bank Mestika Dharma Tbk. (BBMD)	58
4.1.2 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM)	59
4.1.3 PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM)	59
4.1.4 PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN)	59
4.1.5 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)	61
4.1.8 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI)	63
4.1.9 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO)	64
4.1.10 PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)	65
4.1.11 PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA)	65
4.1.12 Bank Mayapada International Tbk. (MAYA)	66
4.1.13 PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI)	67
4.1.14 PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP)	68
4.1.15 PT Bank Artha Graha International Tbk. (INPC)	69
4.1.16 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN)	70
4.1.17 PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA)	70
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	71
4.3 Pengujian Asumsi Klasik	81
4.3.1 Uji Normalitas	81
4.3.2 Uji Multikolinieritas	83
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	83
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	85
4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)	88
4.6 Pengujian Hipotesis	89
4.6.1 Uji <i>t</i> (Uji Parsial)	89
4.7 Pembahasan Penelitian	93

4.7.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap ROE.....	93
4.7.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ROE.....	94
4.7.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap ROE.....	96
4.7.4 Pengaruh Komite Audit terhadap ROE.....	98
4.8 Implikasi Hasil Penelitian.....	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	113

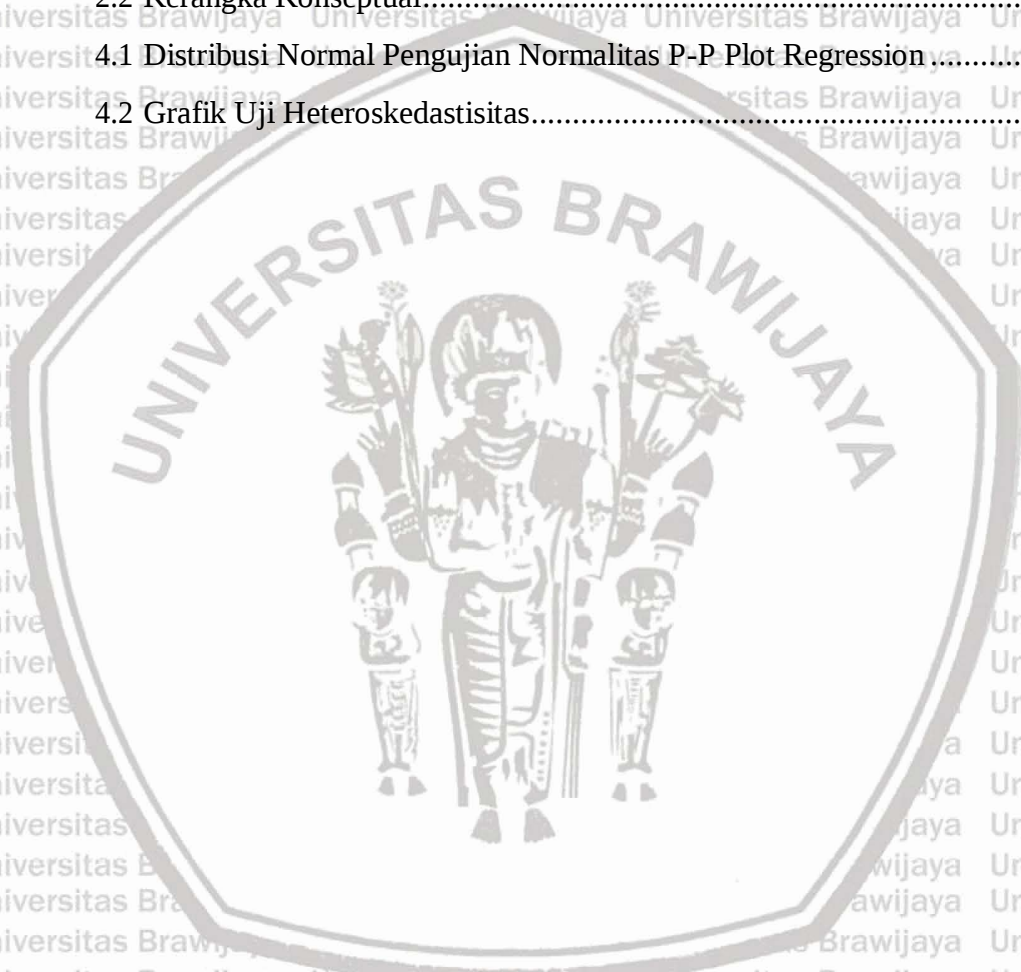


DAFTAR TABEL

3.1 Proses Seleksi Sampel dengan <i>Purposive Sampling</i>	47
3.2 Daftar Perusahaan Perbankan yang Menjadi Obyek Penelitian.....	48
4.1 Deskriptif Statistik Proposi Komisaris Independen (X1)	72
4.2 Deskriptif Statistik Kepemilikan Institusional (X2).....	74
4.3 Deskriptif Statistik Kepemilikan Manajerial (X3)	76
4.4 Deskriptif Statistik Komite Audit (X4).....	78
4.5 Deskriptif Statistik <i>Return on Equity</i> (Y)	80
4.6 Uji Normalitas	83
4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	84
4.8 Hasil Uji Glejser	85
4.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	86
4.10 Hasil dari Uji F	88
4.11 Koefisien Determinasi (R^2).....	88
4.12 Hasil Uji t	90

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	38
2.2 Kerangka Konseptual	42
4.1 Distribusi Normal Pengujian Normalitas P-P Plot Regression	83
4.2 Grafik Uji Heteroskedastisitas	85



**PENGARUH DIMENSI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KINERJA KEUANGAN
(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2014 - 2018)**

Nanda Nurastikha

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Nandanuras18@gmail.com

Dosen Pembimbing:

Kusuma Ratnawati, SE., MM., CFP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 – 2018. Dimensi *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini ialah proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Sedangkan kinerja keuangan perusahaan diukur dengan *Return on Equity*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga didapatkan sampel sebanyak 17 perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan komite audit memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit

**THE INFLUENCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE'S DIMENSION
ON COMPANY FINANCIAL PERFORMANCE**
**(Study on Banking Companies listed on the Indonesia Stock Exchange Period
2014-2018)**

By:

Nanda Nurastikha

Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya

Nandanuras18@gmail.com

Supervisor:

Kusuma Ratnawati, SE., MM., CFP

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of good corporate governance towards company financial performance on Banking Companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2014 – 2018. The dimensions that were used in this study are the proportion of independent board commissioners, institutional ownership, managerial ownership, and audit committee. Company financial performance measured by Return on Equity. Purposive sampling method was used to collect the data and 17 Banking companies enterprises were used as samples. The collected data will be processed and analyze using multiple linear regressions. The result shows that the proportion of independent board commissioners, managerial ownership, and managerial ownership have a positive and significant effect on company financial performance, while the audit committee has a positive and insignificant effect on company financial performance.

Keywords: Good Corporate Governance, Proportion of Independent Board Commissioners, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Audit Committee

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Menurut UU No.10 Tahun 1998 ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam 5 tahun terakhir kondisi perbankan di Indonesia mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan. Realisasi pertumbuhan kredit perbankan di akhir 2015 jauh melambat dibandingkan tahun 2014. Mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2015, jumlah kredit yang disalurkan bank umum di Indonesia mencapai Rp4.057,90 triliun, kredit perbankan hanya bertumbuh sebesar 10,44%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melansir pertumbuhan kredit sepanjang 2016 hanya sebesar 7,87%. Dengan demikian, apabila dibandingkan secara tahunan atau *year on year* pada 2015, pertumbuhan kredit pada akhir 2016 tergolong rendah. Pertumbuhan kredit November 2017 tercatat sebesar 7,5%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,5%. Menjelang semester kedua 2018, ada tanda perlambatan pertumbuhan kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi terjadinya penurunan pertumbuhan penyaluran kredit bank pada tahun 2018 dari 11,7% menjadi 6,08% pada tahun 2019.

Tingkat kredit yang rendah dapat diartikan menurunnya tingkat pendapatan bunga bank. Hal ini disebabkan bank-bank di Indonesia merupakan bank komersil yang tugas utamanya adalah menyalurkan dana dari nasabah kepada para debiturnya. Maka dengan adanya penurunan tingkat pendapatan bunga bank akan menurunkan pula tingkat profitabilitas bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian masih didominasi sektor perbankan yang menyumbang 4,2% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2016. Selain itu, sektor perbankan masih mendominasi industri keuangan dengan aset 78,7% dari total aset industri keuangan (Sri Mulyani). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor perbankan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Saat ini perkembangan ekonomi sangat pesat dan kuat, perusahaan perlu melakukan berbagai inovasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki kinerja yang buruk dan memiliki daya saing yang rendah dan terlebih lagi, memiliki perlindungan yang lemah terhadap investor mereka (Setiawan et al, 2007). Ini ditunjukkan oleh kurangnya transparansi dalam manajemen

perusahaan, penegakan hukum yang tidak memadai oleh pemerintah, dan regulasi keuangan yang buruk pada saat itu (Hidayah, 2008).

Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kewenangan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memastikan keberlanjutan keberadaannya dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Kusnadi, 2015). Kehadiran *Good Corporate Governance* yang baik mutlak diperlukan oleh suatu organisasi. Itu karena mekanisme dan sistem yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan pemegang saham dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan diperlakukan sama. Sistem mekanisme yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada pemegang saham untuk memulihkan investasi mereka secara wajar, tepat dan efisien, dan memastikan bahwa manajemen bertindak untuk keuntungan perusahaan.

Untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan serangkaian sistem dan mekanisme proses. Sistem ini akan membuat operasi, mekanisme dan hubungan dapat dipantau dan dievaluasi secara efektif. Ada lima prinsip tata kelola perusahaan yang diperlukan untuk mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif antara lain yaitu transparansi, tanggung jawab, kesetaraan, kemandirian dan akuntabilitas. Jika mekanisme dan proses ini berjalan dengan baik, perusahaan akan berjalan dengan efektif karena sesuai dengan keinginan pemegang saham.



Implementasi tata kelola perusahaan di Indonesia dianggap relatif lambat dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya (Primadhyta, 2019). Berdasarkan peringkat ACGA (*Asian Corporate Governance Association*) pada Desember 2018, Indonesia berada di peringkat ke-12 di bawah Filipina. Sementara menurut skor tata kelola perusahaan CLSA versus ACGA, Indonesia memiliki skor terendah. Dalam skor tata kelola perusahaan ACGA, Indonesia hanya mencapai 35 poin sementara dalam skor tata kelola perusahaan CLSA, Indonesia menerima lebih dari 50 poin (Acga-asia.org, 2019). Peringkat ini menjelaskan bahwa implementasi dan praktik tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Kebutuhan untuk membahas tata kelola perusahaan muncul sebagai akibat dari perusahaan mengalami penipuan dan keruntuhan. Beberapa praktik pelanggaran Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan oleh perusahaan besar milik negara di Indonesia seperti PT. Kimia Farma, PT. Kereta Api Indonesia dan Jiwasraya. Adanya kasus tersebut mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia belum efektif. (Hamdani, 2016).

Pada tahun 2019, OJK (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia) telah menangkap PT. Garuda Indonesia memanipulasi laporan keuangannya. Dalam hal ini, PT. Garuda Indonesia telah melaporkan laba US \$ 809,84 ribu (setara dengan Rp 11,33 miliar dengan nilai tukar Rp14.000 per US \$ 1) anehnya pada tahun 2017, menderita kerugian US \$ 216,5 juta. Jumlahnya menunjukkan perbedaan yang luar biasa. Dua komisaris

PT. Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria percaya bahwa laporan keuangan ini tidak valid dan tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Penerapan tata kelola perusahaan belum maksimal dan diimplementasikan secara efektif di PT. Garuda Indonesia dan PT. Kereta Api Indonesia. Kasus seperti itu tentu saja akan berdampak negatif bagi perusahaan. Kepercayaan investor akan berkurang karena kurang transparannya laporan keuangan riil mereka. Selain itu, tindakan ini telah melanggar teori keagenan yang seharusnya terjadi antara pemegang saham dan eksekutif perusahaan.

Salah satu kasus buruknya tata kelola perusahaan juga terjadi pada bidang perbankan Indonesia yaitu pada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang kantor kas bank tersebut untuk membuka rekening, baik rekening tabungan, deposit maupun giro. Larangan tersebut juga diikuti karena terdapat pemalsuan bilyet deposito pada kantor kas bank cabang Semarang dan Gresik oleh sindikat yang bekerja sama dengan pegawai PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). kasus korupsi tersebut telah merugikan keuangan negara hampir Rp.50 miliar (Yudistira, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat oknum yang kurang jujur dalam melakukan kewajibannya sebagai salah satu bagian dari manajemen perusahaan. Maka dari itu perlu dibangun kesadaran dari pihak manajemen sebuah perusahaan terutama pada industri perbankan di Indonesia untuk menerapkan *corporate governance* yang baik.

Penting bagi suatu negara untuk memiliki sistem tata kelola perusahaan perbankan yang baik dan sehat. Praktik tata kelola perusahaan yang buruk dapat mempengaruhi perekonomian, selain itu hal tersebut juga dapat memicu terjadinya *bank failure* dan pada jangka panjang dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan aset dan kewajiban bank. Aset dan kewajiban bank berpengaruh terhadap deposit dari nasabah dan apabila dana tersebut tidak mampu dikelola secara efisien oleh bank maka dapat menyebabkan adanya krisis likuiditas. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi *bank failure*, penerapan *good corporate governance* merupakan salah satu penilaian dalam kesehatan bank. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP bahwa penilaian kesehatan bank menggunakan metode RBBR (*Risk-Based Bank Ranking*) dengan berbagai faktor sebagai indikator penilaian, dan salah satunya ialah *good corporate governance*.

Dalam memahami masalah tata kelola perusahaan yang baik, kita perlu menggunakan landasan teori agensi yang berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepercayaan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian dana yang mereka investasikan. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan bagaimana investor memiliki keyakinan bahwa manajer akan menguntungkan investor dan yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan saham dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan dan terikat dengan dana atau modal yang telah diinvestasikan oleh investor, dan terkait dengan bagaimana investor mengendalikan manajer (Shleifer dan Vishny, 2015).

Penerapan *good corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pada pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan tepat waktu, akurat, dan transparan (Sulistiyowati dan Fidiana, 2017). Menurut Iskander & Chamlou (2000) dalam Lastanti (2004), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan external mechanisms. *Internal mechanisms* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara memengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme eksternal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar. Penerapan *good corporate governance* khususnya struktur kepemilikan, proporsi dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit diduga mampu mempengaruhi praktik manajemen laba.

Bagi investor, kinerja keuangan perusahaan dibutuhkan untuk mempertimbangkan dimana para investor akan berinvestasi. Para investor akan mencari dan menanamkan modalnya pada perusahaan yang lebih menguntungkan. Jika kinerja perusahaan baik maka nilai usaha atau keuntungan akan tinggi. Nilai usaha yang tinggi pasti menarik para investor untuk menanamkan modalnya sehingga harga saham akan naik. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran pencapaian kinerja suatu perusahaan (Arif Widyatama, 2013).

Perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena dapat meminimalisir kecurangan dan terhindar dari perilaku yang menyimpang dari peraturan perundangan mengenai tugas dan wewenang kedudukan pemangku kepentingan dan berperilaku berlandaskan tujuan perusahaan untuk mensejahterakan stakeholder atau pemegang saham dan meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga profitabilitas semakin meningkat.

Kinerja keuangan dapat diukur melalui rasio keuangan yang terdapat di laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2017). Menurut Tampubolon (2013:45) rasio keuangan dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio efisiensi, dan rasio profitabilitas. Menurut Brigham & Houston (2013: 132), rasio yang paling penting adalah pengembalian atas ekuitas (*Return On Equity*) yang merupakan laba bersih bagi pemegang saham dibagi dengan total ekuitas pemegang saham. Pemegang saham menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi atas modal yang mereka investasikan, dan *Return On Equity* menunjukkan tingkat pengembalian yang investor peroleh. Jika *Return On Equity* tinggi, maka harga saham juga akan cenderung tinggi. Menurut Sudana (2011: 22), ROE merupakan rasio keuangan yang banyak digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya menyangkut profitabilitas perusahaan.

Good corporate governance diukur menggunakan proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit

Sesuai dari penelitian terdahulu yaitu Rizki Arifani (2013) meneliti tentang hubungan *good corporate governance* dan kinerja keuangan (ROE) pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara komite audit, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap kinerja keuangan sedangkan tidak ditemukan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Yemima (2016) tentang hubungan *good corporate governance* dan kinerja perusahaan pada sektor pertambangan di BEI menunjukkan hasil bahwa komisaris independen, dan komite audit dapat meningkatkan kinerja keuangan diukur dengan ROE, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan oleh perbankan yang diukur dengan ROE.

Karena latar belakang di atas, penulis ingin mempelajari lebih lanjut dimana studi ini akan memperoleh informasi tentang pelaksanaan mekanisme tata kelola perusahaan (proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit) terhadap kinerja keuangan dengan *Return On Equity* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini akan dilakukan dengan judul, **“PENGARUH DIMENSI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014 - 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen (X1) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y) pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah kepemilikan institusional (X2) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y) pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah kepemilikan manajerial (X3) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y) pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah komite audit (X4) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y) pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen (X1) terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y) pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional (X2) terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y) pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial (X3) terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y) pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit (X4) terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y) pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pengetahuan di bidang manajemen keuangan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang dimensi GCG.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan manajemen perusahaan untuk pengungkapan dimensi GCG, supaya dapat menerapkannya secara baik dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pentingnya dimensi GCG sebagai bahan dasar pertimbangan keputusan berinvestasi khususnya dalam menilai kinerja suatu perusahaan.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan serta tambahan referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Pada teori ini dikatakan bahwa sifat dasar manusia terkait dengan teori keagenan ini yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi di masa yang akan datang (*boundedrationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk-averse*). Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*) sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Messier *et al.* (2017:6), hubungan antara pemilik dan manajer umumnya menciptakan asimetri informasi antara kedua belah pihak. Asimetri informasi bermakna bahwa manajer umumnya memiliki informasi yang lebih banyak tentang posisi keuangan dan hasil operasi yang sebenarnya dari entitas daripada pemilik. Informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan hal yang dapat menyesatkan pemilik mengenai kinerja perusahaan. Perilaku asimetri ini dapat diminimalisir dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan ini berjalan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya

pengawasan dan pengendalian ini mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya pengawasan yang lebih banyak, biaya tersebut dinamakan *agency cost*. Timbulnya biaya agen ini kemungkinan disebabkan oleh kegiatan agen yang tidak berbuat sesuai dengan kepentingan investor (*principal*) (Jensen dan Smith, 2000).

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari:

a. *The monitoring expenditures by the principal*

Biaya ini merupakan biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi perilaku dan tindakan *agent*.

b. *The bonding expenditures by the agent*

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk menjamin bahwa manajer (*agent*) tidak akan melakukan tindakan yang merugikan investor (*principal*).

c. *The residual loss*

Biaya penurunan kemakmuran setara nilai mata uang yang dialami oleh *principal* akibat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Salah satu alternatif untuk mengurangi *agency cost* yang dikutip dari Susilawati (2007) yaitu dengan meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajer, sehingga manajer merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan bila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Kepemilikan ini akan mensejajarkan kepentingan manajer dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Susilawati, 2007). Dengan demikian maka kepemilikan saham oleh manajer merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan manajer akan menggunakan hutang secara optimal, sehingga akan meminimumkan *agency cost*.

Teori agensi merupakan dasar yang digunakan dalam memahami isu *corporate governance*, sehingga dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan pada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang mereka investasikan (Herawati, 2008). *Corporate governance* pada umumnya merupakan seperangkat mekanisme di mana investor dari luar melindungi diri mereka dari pengambilalihan oleh orang dalam (La Porta et al., 2000). *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor memiliki keyakinan bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor dan yakin apabila manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan saham ke proyek tidak menguntungkan yang berkaitan dengan dana atau modal yang telah ditanamkan investor, serta berkaitan dengan bagaimana investor mengendalikan para manajer (Shleifer dan Vishny, 2010).

2.1.2 Good Corporate Governance

Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan

kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya (Cardburry Comittee, 2014).

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi (Kusumawardhani, 2012).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2004) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakehonders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Terdapat dua sudut pandang dalam mendefinisikan *Good Corporate Governance* yaitu sudut pandang dalam arti sempit (*narrow view*) dan sudut pandang dalam pengertian lebih luas (*broad view*). Pada sudut pandang sempit, tata kelola perusahaan diartikan sebagai hubungan yang setara antara perusahaan dan pemegang saham. Sedangkan dalam sudut pandang luas, *Good Corporate Governance* diartikan sebagai *a web of relationship*, tidak hanya perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham, akan tetapi perusahaan dengan pihak petaruh (*stakeholder*) yang lainnya seperti karyawan, pelanggan, pemasok, bondholders dan lainnya (Solomon, 2004). Menurut *Forum of Corporate Governance for Indonesia* (FCGI) (2012), corporate governance

adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan (dengan kata lain sebagai sistem yang mengendalikan perusahaan) antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah serta pihak internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.

2.1.3 Prinsip Good Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 terdapat lima prinsip agar corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik, antara lain:

1. Transparansi (Transparency)

Perusahaan dalam menjalankan bisnis dan kegiatan operasionalnya harus menjaga dan mewujudkan keterbukaan informasi yang relevan dan mudah diakses bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), perusahaan juga harus menyampaikan informasi – informasi kepada setiap pemangku kepentingan (stakeholders) sesuai dengan hak masing – masing. Informasi – informasi yang disediakan oleh perusahaan harus mencakup kondisi keuangan, strategi perusahaan, visi dan misi, sasaran usaha, serta pengendalian risiko dan kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan (Daniri, 2005:9).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan best practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka (Tjager dkk, 2003 : 51).

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya (Penny Kusumastuti, 2014:2).

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perusahaan agar pengelolaan perusahaan berjalan dengan efektif. Apabila prinsip akuntabilitas dapat diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, wewenang, hak, kewajiban, serta tanggung jawab antara pemilik perusahaan, dewan komisaris, dan direksi. Dengan adanya kejelasan tersebut maka perusahaan dapat terhindar dari benturan kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas atau pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan yang terdapat di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip – prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian merupakan suatu keadaan dimana para pengelola perusahaan mengambil keputusan secara professional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan prinsip – prinsip pengelolaan korporasi yang sehat dan perundang – undangan yang berlaku.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan merupakan prinsip agar para pengelola perusahaan memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.4 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Daniri (2006:15-16) menjelaskan manfaat-manfaat dari penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan yaitu:

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepetingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
2. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balances di perusahaan.
3. Mengurangi agency cost yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
4. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
5. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.

2.1.5 Indikator *Good Corporate Governance*

2.1.5.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris independen merupakan individu yang tidak menerima benefit atau dana apapun dari perusahaan tersebut tiga tahun kebelakang. Komisaris

Independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

sebuah perusahaan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP anggota Dewan Komisaris Independen beranggotakan kurang lebih 50% dari jumlah Dewan Komisaris.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat direksi, karena komisaris independen memiliki peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya (Hastuti, 2005). Berikut merupakan rumus untuk menghitung proporsi dewan komisaris independen.

$$\text{Proporsi Dewan Komisaris} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Anggota Komisaris}} \times 100$$

Sumber: Darwis, 2009

2.1.5.2 Struktur Kepemilikan

Menurut Sugiarto (2017) struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham, yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Struktur kepemilikan merupakan proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dalam kepemilikan saham perusahaan. Suatu perusahaan diwakilkan oleh direksi yang ditunjuk oleh pemegang saham.

Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Itturiaga dan Sanz (2000) dalam Sabrinna (2010), struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan (*asymmetric information approach*). Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Sedangkan pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal. Jensen dan Meckling (1976) dalam Sabrinna (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah mekanisme GCG yang dapat mengendalikan masalah keagenan.

a. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham (Tjeleni dalam Santoso, 2018). Kepemilikan Manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Darwis, 2009).

Menurut teori Jensen dan Meckling (1976) mengatakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah keagenan yaitu dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Peningkatan tindakan *opportunistic* pada manajer terjadi ketika kepemilikan saham oleh manajer rendah. Peningkatan kepemilikan manajerial membantu untuk menghubungkan kepentingan pihak internal dan pemegang saham, dan mengarah ke pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan nilai perusahaan (Wida, 2014). Rumus untuk menghitung kepemilikan manajerial sebuah perusahaan yaitu:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100$$

Sumber: Darwis 2009

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional dapat diartikan sebagai kepemilikan saham dari pihak institusional lain seperti bank, lembaga asuransi, perusahaan investasi dan institusi lainnya (Darwis, 2009). Menurut Thesarani (2016) menyatakan bahwa kepemilikan Institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.

Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan (Winanda, 2009).

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme GCG yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham (Solomon, 2004 dalam Sabrinna, 2010).

Rumus untuk menghitung kepemilikan Institusional sebuah perusahaan yaitu:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100$$

Sumber : Darwis,2009

2.1.4.3 Komite Audit

Menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam

Nomor: Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa Komite Audit adalah komite yang

dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan

funksinya. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pengertian komite

audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan

Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, jumlah anggota komite audit

pada perusahaan paling sedikit ialah berjumlah 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari

Komisaris Independen dan dari Pihak Luar Emiten atau Perusahaan Publik. Salah satu

anggota dari komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau

keuangan.

Komite audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap

perusahaan. Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor

keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak

memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam

perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016).

2.1.6 Kinerja Keuangan Perusahaan

2.1.6.1 Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas (Jumingan, 2011:239). Yemima (2013) mengatakan kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.

Kinerja perusahaan yang baik dengan biaya modal yang rendah akan mendorong para investor melakukan investasi di perusahaan tersebut. Banyaknya investor yang tertarik akan meningkatkan permintaan investasi, sehingga harga saham perusahaan akan meningkat yang merupakan rantai pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan kemakmuran stakeholders yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (purwantini, 2011).

2.1.6.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Peran kinerja keuangan adalah untuk menilai kondisi keuangan dan pencapaian perusahaan yang biasanya diukur dengan rasio keuangan. Rasio keuangan didefinisikan sebagai penggunaan sistematis rasio untuk menafsirkan laporan keuangan dalam menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan serta kinerja historis perusahaan dan posisi keuangan saat ini (Rao, 2013). Menurut Brigham & Houston (2017:133), jenis – jenis rasio keuangan antara lain:

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara aset lancar yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. Biasanya rasio ini digunakan perusahaan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang sering digunakan antara lain:

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio ini menunjukkan kemampuan aset lancar untuk menutupi kewajiban lancar. Semakin besar persentase hasil perhitungan rasio ini berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya.

Rumus untuk menghitung Rasio Lancar yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio ini menunjukkan kemampuan aset lancar untuk menutupi kewajiban lancar tanpa mempertimbangkan persediaan, karena persediaan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menjadi uang. Piutang dianggap direalisasikan menjadi uang tunai lebih cepat dari persediaan.

Rumus untuk menghitung Rasio Cepat yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Manajemen Aktivita

Rasio Manajemen Aktiva yaitu seperangkat rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivitya, apakah jenis aktivitya yang dilaporkan dalam neraca sudah wajar, terlalu tinggi atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan penjualan.

Rasio yang terdapat dalam rasio manajemen aktiva antara lain:

a. Rasio Perputaran Aktiva Tetap

Rasio ini membagi penjualan dengan aktiva tetap bersih yang dimiliki perusahaan. Rasio ini digunakan perusahaan untuk menilai seberapa efektif perusahaan menggunakan aktiva tetapnya.

Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Perputaran Aktiva Tetap} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Tetap}} \times 100$$

b. Rasio Perputaran Aktiva

Rasio ini membagi pendapatan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan.

Rasio ini digunakan perusahaan untuk menilai seberapa efektif perusahaan menggunakan aktivanya.

Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Perputaran Aktiva Tetap} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3. Rasio Manajemen Utang

Rasio Manajemen Utang yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio yang terdapat dalam manajemen aktiva antara lain:

a. Rasio Utang

Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menjamin utang dengan asetnya. Semakin kecil rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih dapat membayar hutangnya.

Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

4. Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2011), rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan. Profitabilitas adalah aspek fundamental perusahaan, karena selain memberikan daya tarik yang besar bagi investor yang akan menanamkan dana di perusahaan serta untuk mengukur efektivitas dan

efisiensi dalam menggunakan semua sumber daya yang ada dalam proses operasional perusahaan. Rasio yang terdapat dalam rasio profitabilitas antara lain:

a. *Return On Assets (ROA)*

Menurut Kasmir (2011), Rasio ini menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang di gunakan di dalam perusahaan. Dengan kata lain, untuk pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan keseluruhan aktiva yang tersedia.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. *Return On Equity (ROE)*

Return on equity adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri (kasmir, 2015:204). *Return On Equity* merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki (Sutrisno 2012:223). Rasio ini dapat digunakan untuk memprediksi seberapa besar porsi keuntungan yang akan diperoleh (*dividen*) untuk setiap saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

Menurut Brigham dan Houston (2017:133) menyatakan bahwa rasio yang paling penting adalah pengembalian atas ekuitas. Rasio ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Rasio yang paling penting adalah pengembalian atas ekuitas (*return on equity*), yang merupakan laba bersih bagi

pemegang saham di bagi dengan total ekuitas pemegang saham (Brigham & Houston, 2011:133).

Rumus untuk menghitung ROE yaitu sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

(Brigham dan Houston, 2017:133)

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Dimensi *Good Corporate Governance* terhadap *Return On Equity* (alat ukur) kinerja keuangan perusahaan:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Arifani (2013) bertujuan menguji pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan yang tercatat di BEI periode 2010-2011 diukur melalui ROE. GCG yang digunakan adalah jumlah komite audit, proporsi kepemilikan manajerial, proporsi kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komite audit, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap kinerja keuangan. Sedangkan tidak ditemukan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan.
- b. Khansa Shabibah (2017) meneliti tentang pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perbankan periode 2013-2015 dengan Return on Asset dan Return on

Equity sebagai pengukuran kinerja keuangan, sedangkan variabel Good Corporate Governance diukur dengan proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan Institusional, dan komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Asset dan Return on Equity. Komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Return on Asset tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap Return on Equity. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Return of Equity* namun tidak berpengaruh terhadap *Return of Asset*.

- c. Yemima (2016) meneliti mengenai Pengaruh Mekanisme Internal *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dengan arah positif komite audit terhadap profitabilitas, terdapat pengaruh tidak signifikan dengan arah negatif kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas. Terdapat pengaruh tidak signifikan dengan arah positif kepemilikan institusional terhadap profitabilitas dan terdapat pengaruh signifikan dengan arah negatif komisaris independen terhadap profitabilitas.

- d. Eka Mustikasari (2015) melakukan penelitian dengan indikator *good corporate governance* yaitu jumlah komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Pengukuran kinerja keuangan diukur dengan *Return on Equity* (ROE) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa

jumlah Komite audit berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi kinerja keuangan.

- e. Dicky Kusnadi (2018) melakukan penelitian dengan judul pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Return on Equity* pada perusahaan sektor BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017. Hasil menunjukkan bahwa Proporsi dewan komisaris independen, Kepemilikan institusional, dan komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, sedangkan Kepemilikan manajerial mempengaruhi kinerja keuangan.

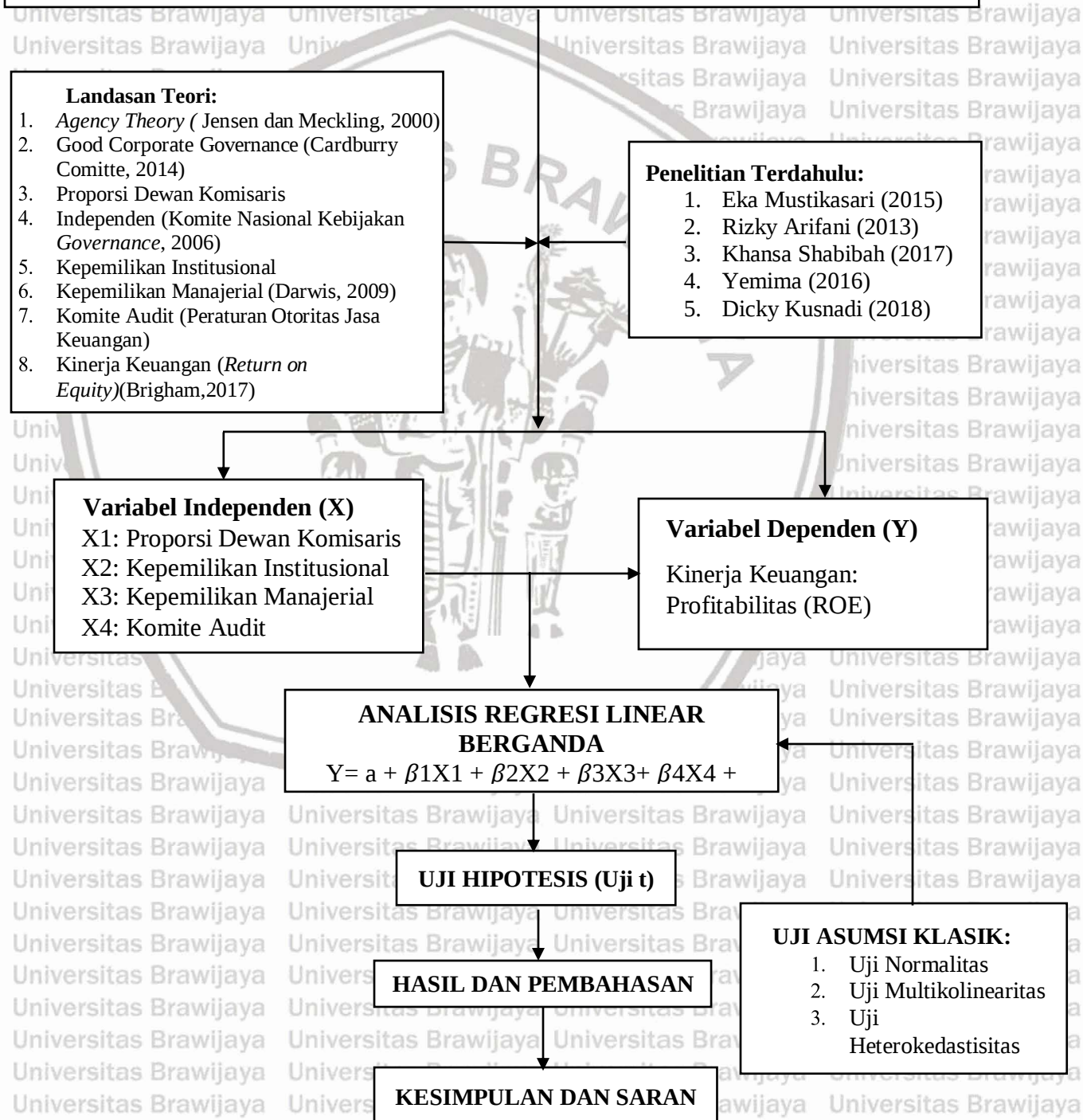
2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian yang menggambarkan konsep dimensi Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE) yakni sebagai berikut:



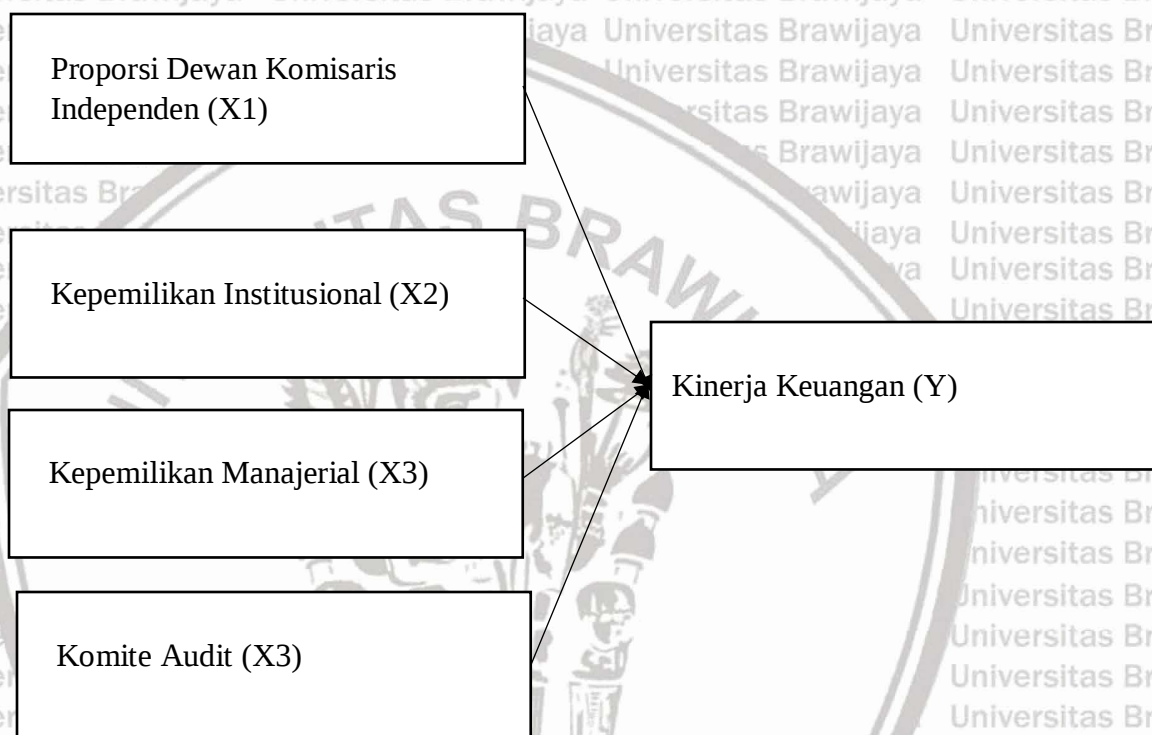
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perlambatan pertumbuhan kredit dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank mendorong perlunya praktik GCG yang efektif pada perusahaan perbankan di Indonesia. Tata kelola perusahaan yang efektif perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan sebagai salah satu svarat pengukuran kesehatan bank.



2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



Sumber: 1 (Darwis, 2009), 2 (Darwis, 2009), 3 (Darwis, 2009),4 (Sulistiyowati dan Firdinia, 2017).

2.5 Konsep Hipotesis

1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (*Return on Equity*)

Pandya dalam Tertius dan Christiawan (2015) dalam mengukur *Good Corporate Governance* terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, salah satunya adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Komisaris independen melakukan peran pengendali dalam mengevaluasi keputusan manajer melalui keterampilan mereka, keahlian, pengetahuan, dan objektivitas untuk mengurangi biaya agensi dan mengutamakan kepentingan pemegang saham. Komisaris independen diharapkan bertanggung jawab untuk membawa penilaian independen dalam menanggung pada masalah strategi, kinerja, dan sumber daya termasuk janji kunci dan standar perilaku.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) bahwa semakin banyak pemonitor di perusahaan maka akan semakin baik karena kemungkinan terjadinya konflik akan semakin rendah dan hal tersebut dapat menurunkan *agency cost*. Selain itu tingginya proporsi untuk dewan komisaris independen akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Stiles dan Taylor, 2001).

Dewan komisaris harus memantau efektivitas praktik *good corporate governance* yang diterapkan perseroan, serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Tuntutan akan transparansi dan independensi terlihat dari adanya tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independen yang

mengawasi tindakan-tindakan para eksekutif (Lastanti, 2004).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Arifani (2013) dan Shabibah (2017) menyatakan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap ROE. Semakin banyak komposisi dewan komisaris independen di suatu perusahaan maka akan mendorong dewan komisaris untuk bertindak secara objektif dan mampu melindungi *stakeholder* perusahaan.

H₁: Terdapat pengaruh antara dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan (ROE) perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (*Return on Equity*)

Kepemilikan Institusional dapat diartikan sebagai kepemilikan saham dari pihak institusional lain seperti bank, lembaga asuransi, perusahaan investasi dan institusi lainnya (Darwis, 2009). Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2005).

Kepemilikan saham dari pihak institusional seperti perbankan, lembaga asuransi, perusahaan investasi dan unsstitusi lain akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini dapat berdampak kepada peningkatan kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan perusahaan yang besar maka kekuatan dan dorongan dalam pengawasan akan besar pula dalam meningkatkan kinerja perusahaannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yemima (2016) dan Rizky Arifani (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh investor eksternal mendorong manajer semakin bertanggungjawab terhadap kinerja perusahaan, sehingga menimalisir adanya tindakan *opportunistic*.

H₂: Terdapat pengaruh antara kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan (ROE) perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Return on Equity)

Menurut Faizal (2004), besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial pada perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan *shareholders*. Apabila perusahaan meningkatkan proporsi kepemilikan saham manajerial maka manajemen akan cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain ialah dirinya sendiri.

Meningkatkan kepemilikan saham manajerial akan mensejajarkan kedudukan manajemen dengan pemegang saham sehingga manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil (Nur'aeni, 2010). Apabila proporsi kepemilikan manajerial meningkat maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat berdampak kepada peningkatan kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khansa Shabibah (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Jika manajer memiliki saham di dalam perusahaan, maka konflik kepentingan antara pemilik dan agen dapat dihindarkan. Hal tersebut dapat mengurangi konflik kepentingan sehingga akan terjalin kesinambungan di dalam perusahaan. Manajer juga akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk menaikkan laba perusahaan.

H₃: Terdapat pengaruh antara kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan (ROE) perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (*Return on Equity*)

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Familia, 2010).

Komite audit memiliki peranan yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan (Sam'ani, 2008).

Apabila fungsi komite audit dalam suatu perusahaan berjalan efektif, maka pengendalian terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akan dapat diminimalisir dan kinerja perusahaan akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Shahibah (2017) dan Yemima (2016) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Keberadaan komite audit yang efektif di dalam perusahaan dapat meminimalisir kecurangan pada laporan keuangannya

sehingga kinerja keuangan meningkat.

H₄: Terdapat pengaruh antara kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan (ROE) perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Adapun penelitian eksplanatori menurut Sugiyono (2006) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel - variabel yang mempengaruhi hipotesis.

3.2 Populasi dan Pengambilan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Burhan Bungin, 2013: 101). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018 yang berjumlah 36 perusahaan.

3.2.2 Sampel

Sampel penelitian adalah sub dari populasi yang dipilih untuk dipelajari (Burhan Bungin, 2013:111). Sampel merupakan sub bagian dari populasi yang diambil melalui cara dan karakteristik tertentu sehingga dapat digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, yakni untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate*

Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan Perbankan yang terdaftar di

BEI, maka sampel yang digunakan dengan menggunakan teknik *purposive*

sampling, yaitu Teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu

(Sugiyono, 2014). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada periode akhir bulan tahun 2014-2018
2. Perusahaan perbankan yang memiliki data terkait variabel yang diteliti (dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit).
3. Perusahaan perbankan memperoleh laba setelah pajak positif secara berturut-turut pada periode 2014-2018.

Total observasi (data) selama lima tahun periode pengamatan disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Proses Seleksi Sampel dengan *Purposive Sampling*

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan Perbankan yang mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada periode akhir bulan tahun 2014- 2018	36

2.	Perusahaan BUMN yang tidak memiliki kelengkapan data variabel mekanisme GCG untuk mendukung penelitian	8
3.	Perusahaan perbankan yang memperoleh laba setelah pajak positif secara berturut-turut pada periode 2014-2018	11
Total Sampel Penelitian		17

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan prosedur pemilihan sampel diatas terdapat 17 perusahaan yang memenuhi kriteria seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Perbankan yang Menjadi Obyek Penelitian

Nama Perusahaan	Tanggal IPO	Laba Positif 2014-2018	Memiliki variabel terkait	Perusahaan yang Menjadi Ssampel
Bank Oke Indonesia Tbk	11-Jul-14	v	x	
Bank Ina Perdana Tbk	16-Jan-14	v	x	
Bank Maspion Indonesia Tbk	11-Jul-13	v	x	
Bank Mestika Dharma Tbk	8-Jul-13	v	v	v
Bank Nationalnobu Tbk	20-May-13	v	x	
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	12-Jul-12	v	v	v
Bank Sinar Mas Tbk	13-Dec-10	v	v	v
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	8-Jul-10	v	x	
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	17-Dec-09	v	v	v

Nama Perusahaan	Tanggal IPO	Laba Positif 2014-2018	Memiliki variabel terkait	Perusahaan yang Menjadi Smpel
Bank BTPN Tbk.	12-Mar-08	v	v	v
Bank Capital Indonesia Tbk	8-Oct-07	v	x	
Bank China Construction Bank Ind. Tbk	3-Jul-07	v	x	
Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	15-Dec-06	v	v	v
Bank Bukopin Tbk	10-Jul-06	v	v	v
Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk	10-Nov-03	v	v	v
Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk	8-Aug-03	v	v	v
Bank Mandiri (Persero) Tbk	14-Jul-03	v	v	v
Bank Central Asia Tbk	31-May-00	v	v	v
Bank Mega Tbk	17-Apr-00	v	x	
Bank Bumi Arta Tbk	31-Dec-99	v	x	
Bank Mayapada International Tbk	29-Aug-97	v	v	v
Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk	25-Nov-96	v	v	v
Bank OCBC NISP Tbk	20-Oct-94	v	v	v
Bank Artha Graha International Tbk	29-Aug-90	v	v	v
Bank Danamon Indonesia Tbk	6-Dec-89	v	v	v
Bank CIMB Niaga Tbk	29-Nov-89	v	v	v
Bank Maybank Indonesia Tbk	21-Nov-89	v	x	
Bank Pan Indonesia Tbk	29-Dec-82	v	x	
Bank Victoria International Tbk	30-Jun-99	x	v	
Bank QNB Indonesia Tbk	21-Nov-02	x	v	
Bank Permata Tbk	15-Jan-90	x	v	
Bank of India Indonesia Tbk	1-May-02	x	v	
Bank J Trust Indonesia Tbk	25-Jun-97	x	v	
Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	13-Jul-01	x	v	



Nama Perusahaan	Tanggal IPO	Laba Positif 2014-2018	Memiliki variabel terkait	Perusahaan yang Menjadi Smpel
Bank IBK Indonesia, Tbk.	22-Des-14	x	v	
Bank MNC Internasional Tbk	15-Jul-02	x	v	

Sumber: Data diolah, 2020

Keterangan :

v: Memenuhi kriteria

x: Tidak memenuhi kriteria

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Menurut Jonathan Sarwono (2006:209) mengatakan bahwa data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan tahunan serta laporan keberlanjutan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari 2014-2018 yang menjadi sampel penelitian. Dalam penelitian ini, Pengumpulan data diperoleh dengan mengunduh laporan keuangan melalui *website* resmi PT Bursa Efek Indonesia pada www.idx.co.id.

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi.

Teknik dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara

membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya (Jonathan Sarwono, 2006: 225). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik dokumentasi, yakni dengan mengunduh data berupa laporan tahunan dan data-data yang diperlukan dari website perusahaan, publikasi BEI, dan website www.sahamok.com.

34 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ukuran yang dipakai oleh penelitian terdahulu, sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011: 61). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan.

Kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada tiap akhir tahun yang diukur dengan ROE. Perhitungan kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Equity* (ROE) yang membandingkan laba bersih dengan ekuitas. Rasio ini dapat digunakan untuk memprediksi seberapa besar porsi keuntungan yang akan diperoleh (dividen) untuk setiap saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

Profitabilitas disimbolkan dengan simbol (Y). Berikut ini perhitungan kinerja keuangan dengan ROE:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

(Brigham dan Houston, 2017:133)

3.4.2 Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2011: 61).

Variabel independen pada penelitian ini yakni *Good Corporate Governance* (GCG) yang mekanismenya berupa Proporsi Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit.

1. Proporsi Dewan Komisaris Independen (X1)

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen adalah presentase jumlah komisaris independen dibagi dengan total jumlah anggota dewan komisaris (Darwis, 2009).

Secara sistematis diformulasikan dengan rumus:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Anggota Komisaris}} \times 100$$

(Sumber: Darwis, 2019)

2. Kepemilikan Institusional (X2)

Kepemilikan Institusional dapat diartikan sebagai kepemilikan saham dari pihak institusional lain seperti bank, lembaga asuransi, perusahaan investasi dan institusi lainnya (Darwis, 2009). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepemilikan institusional dengan melihat presentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dari total lembar saham yang beredar di masyarakat (Priyatna Bagus Susanto, 2013; Yemima, 2016).

Secara sistematis diformulasikan dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100$$

(Sumber: Darwis, 2009)

3. Kepemilikan Manajerial (X3)

Kepemilikan Manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Darwis, 2009). Pada laporan keuangan, dapat dilihat dari besarnya presentase saham yang dimiliki manajer di perusahaan.

Rumus perhitungan kepemilikan manajerial ialah:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100$$

(Sumber: Darwis, 2009)

4. Komite Audit (X4)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit diharapkan mampu bertindak secara independensi dalam membantu dewan komisaris melaksanakan pengawasan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, jumlah anggota komite audit pada perusahaan paling sedikit ialah berjumlah 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan dari Pihak Luar Emiten atau Perusahaan Publik. Variabel ini diukur secara numeral, yaitu jumlah nominal dari anggota audit perusahaan.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh deksripsi mengenai data yang digunakan dalam penelitian dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai minimum, nilai maksimum, range, dan sebagainya (Ghozali, 2011). Menurut Sugiyono (2012) Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeksripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa membuat analisis dan kesimpulan yang umum.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau kedua variabel tersebut mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Uji Normalitas dapat digunakan dengan menggunakan Test Normality Kolmogrov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan probabilitas (Santoso, 2015):

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal
- Jika Probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik, variabel- variabel independennya tidak berkorelasi satu sama lain. Mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat besarnya nilai VIF (*Varianse Inflation Factor*). Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila memiliki nilai VIF di sekitar angka 1 dan memiliki angka tolerance mendekati 1 (Santoso, 2015).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi yang lainnya (Imam Ghozali, 2006:139). Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat

grafik plot antara prediksi variabel dependen (*Z-PRED*) dengan residualnya (*S-RESID*).

Jika titik-titik dalam grafik *Scatterplot* menyebar secara acak dan tidak membentuk pola, maka tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model tersebut dikatakan baik atau layak digunakan.

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya) (Sugiyono, 2012). Formulasi dari regresi linier berganda pada penelitian ini ialah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 \dots \dots \dots \beta_n X_n + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel Y

α = Konstanta

$\beta_1, \dots, \beta_n$ = Koefisien Regresi

$X_1, \dots, X_n$ = Variabel Independen

ϵ = Error, variabel gangguan

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan ialah Proporsi Dewan Komisaris Independen (PKI), Kepemilikan Institusional (KI), Kepemilikan Manajerial (KM), dan Komite Audit (Audit). Sedangkan untuk variabel dependen yaitu kinerja keuangan perusahaan diukur dengan Return on Equity (ROE). Untuk

mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, maka digunakan model regresi linear berganda α yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \alpha + \beta_1 \text{PKI} + \beta_2 \text{KI} + \beta_3 \text{KM} + \beta_4 \text{Audit} + \epsilon$$

3.5.4 Uji F (Uji Goodness of Fit) dan Koefisien Determinasi (R^2)

3.5.4.1 Uji F (Uji Goodness of Fit)

Uji Godness of Fit merupakan uji yang digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dan menaksir nilai actual (Imam, 2012). Uji Godness of Fit dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran nilai statistik F. *Godness of Fit* dilakukan untuk menguji apakah substruktur model yang digunakan signifikan atau tidak, sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut dapat digunakan (Priyatno, 2012).

Uji *Godness of Fit* adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

Uji *Godness of Fit* ini merupakan tahap awal apakah model regresi yang digunakan pada penelitian ini layak atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan angka taraf signifikan hasil perhitungan dengan taraf signifikansi 0.05.

Apabila nilai hasil perhitungan taraf signifikansi yang dimiliki lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05, maka model regresi penelitian layak untuk digunakan.

Menurut Sugiyono (2014) dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota data atau kasus

F = Hasil perhitungan ini dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan *degree freedom* = $k(n-k-1)$ dengan kriteria berikut:

1. H_0 ditolak jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau nilai sig $< \alpha$
2. H_0 ditolak jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau nilai sig $> \alpha$

Jika terjadi penerimaan H_0 , maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

3.5.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen terhadap variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan dalam menjelaskan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terkait (Ghozali, 2011).

Menurut Ghozali (2011) besarnya koefisien determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- Jika Kd mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah
- Jika Kd mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

3.5.5 Uji Hipotesis

Menurut Burhan Bungin (2005:82) pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian statistik sehingga relative mendekati kebenaran. Dengan demikian, penjelasan pengujian lebih dapat diterima sejauh mana hipotesis penelitian diterima atau ditolak.

3.5.5.1 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2011).

Menurut sugiyono (2014), uji t tersebut menggunakan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Distribusi t

r = Koefisien korelasi parsial

r^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t ini ialah:

- a. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Berarti variabel independen memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Periode penelitian tahun 2014 sampai dengan 2018 yang memiliki kelengkapan data variabel mekanisme GCG untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan kriteria sampel yang ada didapat 17 perusahaan, periode penelitian 5 tahun, sehingga terdapat 85 sampel. Berikut ini gambaran umum perusahaan sektor transportasi yang dijadikan obyek penelitian.

4.1.1 PT. Bank Mestika Dharma Tbk. (BBMD)

PT. Bank Mestika Dharma Tbk adalah bank yang berkantor pusat di Medan Sumatera Utara yang berkedudukan di Jl. Zainul Arifin No.118. PT. Bank Mestika Dharma Tbk berdiri sejak tahun 1955 adalah merupakan Bank Umum Swasta Devisa serta satu-satunya bank daerah yang telah Go Public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode BBMD, listing sejak 8 Juli 2013.

PT. Bank Mestika Dharma Tbk dalam menjalankan bisnisnya tetap fokus pada usaha retail banking dengan mengedepankan prinsip prudential banking serta manajemen resiko yang baik dan didukung oleh jasa pelayanan yang profesional dengan meningkatkan service quality.

4.1.2 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961. Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia (BI) No 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

4.1.3 PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM)

PT Bank Sinarmas Tbk. didirikan pada 18 Agustus 1989 berdasarkan Akta No. 52 tanggal 18 Agustus 1989 dengan nama PT Bank Shinta Indonesia dan telah diubah dengan Akta No. 91 tanggal 15 September 1989 dari notaris yang sama. Bank memperoleh status sebagai Bank Umum Devisa tahun 1995. Tahun 2005, PT Sinar Mas Multiartha Tbk., perusahaan financial services yang berada di bawah Kelompok Usaha Sinar Mas mengambil alih 21% saham di PT Bank Shinta Indonesia. Pada

Desember 2006 Bank berganti nama menjadi PT Bank Sinarmas. Pergantian nama tersebut telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tertuang dalam Akta No. 1 tanggal 21 November 2006.

Pada tahun 2009, Bank Sinarmas memperoleh ijin untuk pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/13/KEP. Dpg/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Sinarmas dan di tahun yang sama Bank memperoleh pengesahan dari Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan kegiatan usaha Wali Amanat. Pada 13 Desember 2010, Bank Sinarmas melakukan Penawaran Saham Umum Perdana (*Initial Public Offering* /IPO) dengan struktur permodalan sebesar Rp728 miliar.

4.1.4 PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN)

Bank BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal Bank BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897, pada masa pemerintah Belanda. Tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal Bank BTN. Bank BTN pada tanggal 29 Januari 1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI No. B-49/MK/I/1974 sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, maka mulai 1976 mulailah realisasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pertama kalinya oleh Bank BTN di negeri ini.

Pada tahun 1989 Bank BTN sudah mengeluarkan obligasi pertamanya. Pada tahun 1992 status Bank BTN ini menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Bank

BTN berubah status sebagai bank Konvensional menjadi Bank Devisa pada tahun 1994. Layanan bank dalam bentuk penerbitan *Letter of Credit* (L/C), pembiayaan usaha dalam bentuk Dollar. Berdasarkan kajian konsultan independent, Price Water House Coopers, Pemerintah melalui menteri BUMN dalam surat No. 5-544/MMBU/2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Bank BTN melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009.

4.1.5 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) didirikan 16 Februari 1985. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BTPN adalah melakukan kegiatan usaha di bidang bank umum termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah. Usaha perbankan syariah dijalankan oleh anak usaha, yakni PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (dahulu PT Bank Sahabat Purba Danarta), dimana 70% sahamnya dimiliki oleh BTPN.

Bank BTPN memperoleh izin sebagai bank umum pada tanggal 22 Maret 1993 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan izin sebagai bank devisa pada 16 Februari 2016 dari Bank Indonesia (BI). Pada tanggal 29 Februari 2008, BTPN memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BTPN (IPO) kepada masyarakat.

4.1.6 PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA)

Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (sebelumnya Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk) (SDRA) didirikan 15 Juni 1972. Saat ini, Bank Woori Saudara memiliki 22 kantor cabang, 99 kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional, 20 kantor kas dan 28 kas mobil. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SDRA adalah menjalankan usaha sebagai bank umum. Bank Woori Saudara mulai beroperasi sebagai bank umum pada bulan Juli 1993, sebagai bank umum kustodian pada tanggal 8 Oktober 2007 dan sebagai bank devisa pada tanggal 14 April 2008.

Pada tanggal 04 Desember 2006, SDRA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham SDRA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 500.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp115,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Desember 2006.

4.1.7 PT. Bank Bukopin Tbk. (BBKP)

Bank Bukopin Tbk (BBKP) didirikan di Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) dan mulai melakukan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971. Saat ini, Bank Bukopin memiliki 41 kantor cabang, 129 kantor cabang pembantu, 75 kantor fungsional, dan 152 kantor kas. Dalam perkembangannya, Bank Bukopin telah melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Kemudian

pada 02 Januari 1990 dalam Rapat Anggota Bank Umum Korporasi Indonesia memutuskan mengganti nama Bank menjadi Bank Bukopin.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, usaha BBKP mencakup segala kegiatan bank umum dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2006, BBKP memperoleh pernyataan efektif BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBKP (IPO) kepada masyarakat sejumlah 843.765.500 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dan harga penawaran sebesar Rp350,- per saham. Saham-saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 Juli 2006.

4.1.8 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI)

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) (BBRI) didirikan 16 Desember 1895. Kantor pusat Bank BRI berlokasi di Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210. Saat ini, BBRI memiliki 19 kantor wilayah, 1 kantor inspeksi pusat, 19 kantor inspeksi wilayah, 462 kantor cabang domestik, 1 kantor cabang khusus, 609 kantor cabang pembantu, 984 kantor kas, dan 5.380 BRI unit. Bank BRI juga memiliki 2 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands dan Singapura, 2 kantor perwakilan yang berlokasi di New York dan Hong Kong, serta memiliki 5 anak usaha yaitu Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO/BRI Agro), PT Bank BRISyariah, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRI Life dahulu dikenal Bringin Life), BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong dan PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BBRI adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dengan melakukan usaha di bidang perbankan, termasuk melakukan kegiatan operasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 31 Oktober 2003, BBRI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBRI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 3.811.765.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp875,- per saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp875,- setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003.

4.1.9 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO)

Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (Bank BRI AGRO) (dahulu Bank Agroniaga Tbk) (AGRO) didirikan pada tanggal 27 September 1989 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Bank BRI AGRO memiliki 1 kantor pusat non operasional, 18 kantor cabang dan 20 kantor cabang pembantu. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan AGRO adalah menjalankan kegiatan umum di bidang perbankan, dengan fokus utama di sektor agribisnis. Bank BRI AGRO memperoleh izin sebagai bank umum pada tanggal 11 Desember 1989 dan izin sebagai Bank Devisa 08 Mei 2006.

Pada tanggal 30 Juni 2003, AGRO memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham AGRO (IPO) kepada masyarakat melalui pasar modal. Kemudian pada 8 Agustus 2003 Perusahaan mencatatkan saham perdananya sebanyak 1.514.043.000 lembar saham di Bursa Efek Indonesia.

4.1.10 PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)

Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) (BMRI) didirikan 02 Oktober 1998 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Saat ini, Bank Mandiri mempunyai 12 kantor wilayah domestik, 83 kantor area, dan 1.297 kantor cabang pembantu, 1.075 kantor mandiri mitra usaha, 178 kantor kas dan 6 cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Dili Timor Plaza dan Shanghai (Republik Rakyat Cina).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BMRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan. Pada tanggal 23 Juni 2003, BMRI memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BMRI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 4.000.000.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp675,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 14 Juli 2003.

4.1.11 PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA)

Bank BCA didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 oleh Sudono Salim. Pada tahun 1990-an BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM

(Anjungan Tunai Mandiri atau *Automated Teller Machine*). ATM pada masa itu pertama kali dikembangkan oleh Bank BCA. Pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai tempat di Jakarta. Pengembangan jaringan dan fitur ATM dilakukan secara intensif.

Bank BCA memiliki berbagai produk dan layanan yang telah disediakan oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan para nasabah secara optimal. Produk dan jasa yang ditawarkan Bank BCA antara lain produk simpanan, kartu kredit, fasilitas kredit, layanan transaksi perbankan, fasilitas valuta asing, dsb. Pada tanggal 11 Mei 2000, BBCA memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana BBCA (IPO) sebanyak 662.400.000 saham dengan jumlah nilai nominal Rp500,- dengan harga penawaran Rp1.400,- per saham. Penawaran umum ini dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Mei 2000.

4.1.12 Bank Mayapada International Tbk. (MAYA)

Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) didirikan 07 September 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Maret 1990. Bank Mayapada memiliki 36 kantor cabang, 77 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas dan 85 kantor fungsional. Bank Mayapada memperoleh ijin usaha sebagai bank komersial dari Kementerian Keuangan pada tanggal 16 Maret 1990 dan memperoleh ijin kegiatan usaha sebagai bank devisa dari Bank Indonesia pada tanggal 3 Juni 1993.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank Mayapada adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya. Pada tanggal 07 Agustus 1997, MAYA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MAYA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 65.000.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp800,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 29 Agustus 1997.

4.1.13 PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI)

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI) (BBNI) didirikan 05 Juli 1946 di Indonesia sebagai Bank Sentral. Pada tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Bank BNI memiliki 196 kantor cabang, 944 cabang pembantu domestik serta 829 outlet lainnya. Selain itu, jaringan Bank BNI juga meliputi 5 kantor cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London dan Korea Selatan serta 1 kantor perwakilan di New York.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan (termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah melalui anak usaha). Selain itu, Bank BNI juga menjalankan kegiatan usaha diluar perbankan melalui anak usahanya, antara lain: asuransi jiwa, pembiayaan, sekuritas dan jasa keuangan. Pada tanggal 28 Oktober 1996, BBNI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran



Umum Perdana Saham BBNI (IPO) Seri B kepada masyarakat sebanyak 1.085.032.000

dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp850,- per saham.

Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 25 November 1996.

4.1.14 PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP)

Bank OCBC NISP Tbk (dahulu Bank NISP Tbk) (NISP) didirikan tanggal 04 April 1941 dengan nama NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1941. Saat ini, Bank OCBC NISP memiliki 46 kantor cabang, 249 kantor cabang pembantu, 22 kantor kas, 10 kantor cabang syariah dan 12 payment point.

Pada awal pendiriannya, NISP beroperasi sebagai bank tabungan kemudian tanggal 20 Juli 1967 NISP memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lalu tanggal 8 September 2009 NISP memperoleh ijin unit usaha syariah Berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia, NISP mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 12 Oktober 2009.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan NISP adalah melakukan kegiatan usaha di bidang bank umum termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah. Pada tanggal 16 September 1994, NISP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham NISP (IPO) kepada masyarakat sebanyak 12.500.000 dengan nilai nominal

Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp3.100,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 20 Oktober 1994.

4.1.15 PT Bank Artha Graha International Tbk. (INPC)

Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC) didirikan tanggal 07 September 1973 dengan nama PT Inter-Pacific Financial Corporation dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1975 sebagai lembaga keuangan bukan bank. Bank Artha Graha memiliki 39 kantor cabang, 64 kantor cabang pembantu, dan 14 kantor kas.

Pada tanggal 2 Februari 1993, PT Inter-Pacific Financial Corporation berubah nama menjadi PT Inter-Pacific Bank dan mendapatkan izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 24 Februari 1993. Kemudian tanggal 01 September 1998 PT Inter-Pacific Bank berubah nama menjadi Bank Inter-Pacific Tbk. Pada tanggal 16 Agustus 2005 Bank Inter-Pacific Tbk berganti nama menjadi Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan INPC adalah melakukan usaha di bidang perbankan. INPC melakukan operasi komersial sebagai bank umum tanggal 24 Februari 1993. Pada tanggal 10 Juli 1990, INPC memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham INPC (IPO) kepada masyarakat sebanyak 5.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp9.750,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 23 Agustus 1990.



4.1.16 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN)

Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) didirikan 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Bank Danamon memiliki 42 kantor cabang utama domestik, 1.180 kantor cabang pembantu domestik dan danamon simpan pinjam, 13 kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu syariah. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BDMN adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. BDMN mulai melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah tersebut sejak tahun 2002 dan pada tahun 2004 mulai melakukan kegiatan usaha mikro dengan nama Danamon Simpan Pinjam. Selain itu, Bank Danamon juga menjalankan usaha diluar perbankan melalui anak usahanya, yakni bidang pembiayaan dan asuransi.

Pada tanggal 24 Oktober 1989, BDMN memperoleh pernyataan efektif dari Menteri Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BDMN (IPO) kepada masyarakat sebanyak 12.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp12.000,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 06 Desember 1989.

4.1.17 PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA)

Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) didirikan 04 Nopember 1955. Saat ini Bank CIMB Niaga memiliki 156 kantor cabang, 586 kantor cabang pembantu, 34 kantor pembayaran, 30 Unit cabang Syariah dan 616 kantor layanan Syariah. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank CIMB Niaga adalah

melakukan usaha di bidang perbankan, dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Bank CIMB Niaga mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 27 September 2004.

Pada tanggal 02 Oktober 1989, BNGA memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BNGA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 5.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp12.500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 29 Nopember 1989.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang diteliti, yaitu variabel Proporsi Komisaris Independen (X2), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4). Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik, deskripsi variabel Proporsi Komisaris Independen (X1) yang terdiri dari nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi perusahaan sampel selama tahun pengamatan disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Deskriptif Statistik Proporsi Komisaris Independen (X1)

No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018	Max	Min	Avg
1	AGRO	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	50.00	52.00
2	BBCA	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
3	BBKP	57.14	50.00	57.00	50.00	50.00	57.14	50.00	52.83
4	BBMD	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5	BBNI	50.00	63.00	63.00	50.00	67.00	67.00	50.00	58.60
6	BBRI	83.00	82.50	70.00	76.36	70.00	83.00	70.00	76.37
7	BBTN	50.00	57.00	57.00	48.00	56.00	57.00	48.00	53.60
8	BDMN	50.00	57.00	57.00	40.00	50.00	57.00	40.00	50.80
9	BJTM	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	40.00	42.00
10	BMRI	67.00	60.00	60.00	60.00	60.00	67.00	60.00	61.40
11	BNGA	50.00	50.00	50.00	50.00	57.00	57.00	50.00	51.40
12	BSIM	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
13	BTPN	43.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	43.00	54.60
14	INPC	50.00	50.00	60.00	50.00	43.00	60.00	43.00	50.60
15	MAYA	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	60.00	50.00	56.00
16	NISP	50.00	50.00	50.00	63.00	63.00	63.00	50.00	55.20
17	SDRA	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
	Max	83.00	82.50	75.00	76.36	75.00	83.00	75.00	76.37
	Min	40.00	40.00	40.00	40.00	43.00	47.00	40.00	42.00
	Avg	55.42	55.97	56.82	54.08	56.35	60.60	51.53	55.73
	Std Dev	11.22	10.46	8.51	10.36	8.80	8.87	9.67	8.84

Keterangan:

- 2014: Rasio Proporsi Komisaris Independen tahun 2014
- 2015: Rasio Proporsi Komisaris Independen tahun 2015
- 2016: Rasio Proporsi Komisaris Independen tahun 2016
- 2017: Rasio Proporsi Komisaris Independen tahun 2017
- 2018: Rasio Proporsi Komisaris Independen tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4.1. dapat diketahui bahwa secara umum rata - rata rasio proporsi komisaris independen pada perusahaan perbankan periode 2014-2018 dengan

rasio sebesar 55.73%. BBRI memiliki rata-rata komisaris independen tertinggi yaitu 76.37%, sedangkan BJTM memiliki rata-rata rasio komisaris independen terendah yaitu 42.00%. Selama tahun pengamatan, terdapat 6 perusahaan yang memiliki rata-rata rasio proporsi komisaris independen diatas rata-rata proporsi komisaris independen seluruh perusahaan yakni BBKA, BBNI, BBRI, BMRI, MAYA dan SDRA. Sedangkan terdapat 11 perusahaan yang memiliki rata-rata rasio proporsi komisaris independen dibawah rata-rata kepemilikan institusional seluruh perusahaan yakni AGRO, BBKP, BBMD, BBTN, BDMN, BJTM, BNGA, BSIM, BTPN, IMPC, dan NISP.

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa sampel perusahaan perbankan tahun 2014-2018 sudah mampu memenuhi kriteria tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 yang mensyaratkan bagi perusahaan yang memiliki dewan komisaris lebih dari 2 orang, maka jumlah komisaris independen paling sedikit yakni dengan rasio 30.00% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris.

Pada tabel 4.1 nilai rata-rata rasio komisaris independen seluruh perusahaan perbankan tahun 2014-2018 adalah sebesar 55.73%. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi rata-rata perusahaan dalam jumlah komisaris independen sebesar 8.84%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari komisaris independen relatif kecil atau dapat dikatakan memiliki sebaran data yang normal.

Tabel 4.2 Deskriptif Statistik Kepemilikan Institusional (X2)

No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018	Max	Min	Avg
1	AGRO	94.45	96.33	94.31	92.80	93.43	96.33	92.80	94.26
2	BBCA	97.16	97.15	97.15	94.94	94.94	97.16	94.94	96.27
3	BBKP	59.40	59.40	59.40	59.40	65.73	65.73	59.40	60.67
4	BBMD	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44
5	BBNI	96.59	95.24	95.64	96.99	96.26	96.99	95.24	96.14
6	BBRI	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75
7	BBTN	60.13	60.04	60.00	60.00	60.00	60.13	60.00	60.03
8	BDMN	74.16	74.18	73.95	79.03	73.83	79.03	73.83	75.03
9	BJTM	75.00	75.00	79.85	79.70	79.68	79.85	75.00	77.85
10	BMRI	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
11	BNGA	81.92	81.92	81.48	81.48	81.48	81.92	81.48	81.66
12	BSIM	56.00	55.55	58.62	58.83	60.71	60.71	55.55	57.94
13	BTPN	66.88	69.38	69.38	61.00	60.91	69.38	60.91	65.51
14	INPC	51.17	51.17	58.05	58.05	58.05	58.05	51.17	55.30
15	MAYA	85.49	87.57	88.14	87.03	87.02	88.14	85.49	87.05
16	NISP	85.08	85.08	85.08	85.08	85.08	85.08	85.08	85.08
17	SDRA	80.08	80.08	80.08	84.55	84.55	84.55	80.08	81.87
	Max	97.16	97.15	97.15	96.99	96.26	97.16	95.24	96.27
	Min	51.17	51.17	58.05	58.05	58.05	58.05	51.17	55.30
	Avg	76.45	76.72	77.49	77.36	77.52	78.78	75.72	77.11
	Std Dev	15.03	15.11	14.09	14.37	13.82	13.79	14.96	14.39

Keterangan:

a. 2014: Rasio Kepemilikan Institusional tahun 2014

b. 2015: Rasio Kepemilikan Institusional tahun 2015

c. 2016: Rasio Kepemilikan Institusional tahun 2016

d. 2017: Rasio Kepemilikan Institusional tahun 2017

e. 2018: Rasio Kepemilikan Institusional tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4.2. dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata rasio kepemilikan institusional pada perusahaan Perbankan periode 2014-2018 sebesar

77.11%. BBKA memiliki rata-rata rasio kepemilikan institusional terbesar yaitu 96.27%, sedangkan INPC memiliki rata-rata rasio kepemilikan institusional terendah yaitu 55.30%. Selama tahun pengamatan, terdapat sebagian (6 dari 17 perusahaan) yakni BBKP, BBTN, BMRI, BSIM, BTPN dan INPC yang memiliki rata-rata rasio kepemilikan institusional dibawah rata-rata kepemilikan institusional seluruh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keenam perusahaan tersebut cenderung lebih membatasi institusi dari luar perusahaan untuk menginvestasikan sahamnya dan lebih membuka peluang bagi publik perorangan atau pihak manajerial guna memiliki mayoritas sahamnya. Sedangkan sebelas perusahaan lainnya yakni BBKA, BBMD, BBNI, BBRI, BJTM, BNGA, SDRA, AGRO, MAYA, NISP, dan BDMN lebih cenderung memberikan peran yang cukup besar dalam menanamkan modal bagi institusi dari luar perusahaannya. Dengan demikian pihak institusi memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi perusahaan.

Pada Tabel 4.2., nilai rata-rata rasio kepemilikan institusional seluruh perusahaan perbankan tahun 2014-2018 adalah sebesar 77.1%. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi rata-rata perusahaan dalam rasio kepemilikan institusional sebesar 14.39%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari jumlah kepemilikan institusional relatif kecil atau memiliki sebaran data yang normal.

Tabel 4.3 Deskriptif Statistik Kepemilikan Manajerial (X3)

No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018	Max	Min	Avg
1	AGRO	0.08	0.03	0.04	0.06	0.05	0.08	0.03	0.05
2	BBCA	0.24	0.25	0.20	0.19	0.19	0.25	0.19	0.21
3	BBKP	0.15	0.01	0.01	0.01	0.00	0.15	0.00	0.03
4	BBMD	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
5	BBNI	0.21	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.26
6	BBRI	1.60	1.60	0.60	0.30	0.40	1.60	0.30	0.90
7	BBTN	0.05	0.05	0.00	0.00	0.01	0.05	0.00	0.02
8	BDMN	0.18	0.17	0.16	0.04	0.03	0.18	0.03	0.11
9	BJTM	0.01	0.01	0.06	0.07	0.10	0.10	0.01	0.05
10	BMRI	0.05	0.05	0.01	0.00	0.00	0.05	0.00	0.02
11	BNGA	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.00	0.01
12	BSIM	0.03	0.04	0.03	0.00	0.00	0.04	0.00	0.02
13	BTPN	0.80	0.64	0.65	1.17	0.85	1.17	0.64	0.82
14	INPC	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03
15	MAYA	0.67	0.67	0.45	0.46	0.48	0.67	0.45	0.54
16	NISP	0.01	0.010	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
17	SDRA	0.23	0.18	0.18	0.10	0.09	0.23	0.09	0.15
	Max	1.60	1.60	0.65	1.17	0.85	1.60	0.64	0.90
	Min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	Avg	0.25	0.23	0.16	0.16	0.14	0.29	0.11	0.19
	Std Dev	0.41	0.40	0.21	0.29	0.22	0.44	0.18	0.28

Keterangan:

- 2014: Rasio Kepemilikan Manajerial tahun 2014
- 2015: Rasio Kepemilikan Manajerial tahun 2015
- 2016: Rasio Kepemilikan Manajerial tahun 2016
- 2017: Rasio Kepemilikan Manajerial tahun 2017
- 2018: Rasio Kepemilikan Manajerial tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata rasio kepemilikan manajerial pada perusahaan perbankan periode 2014-2018 sebesar

0.194%. BBRI memiliki rata-rata rasio kepemilikan manajerial terbesar yaitu 0.900%, sedangkan NISP memiliki rata-rata rasio kepemilikan institusional terendah yaitu 0.010%. Selama tahun pengamatan, sebagian besar perusahaan perbankan (12 dari 17 perusahaan) yakni AGRO, BBKP, BBMD, BBTN, BDMN, BJTM, BMRI, BNGA, BSIM, INPC, NISP, dan SDRA yang memiliki rata-rata rasio kepemilikan manajerial dibawah rata-rata kepemilikan manajerial seluruh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut cenderung membuka lebih besar peluang institusi dari luar perusahaan dan publik perorangan untuk menginvestasikan sahamnya. Sedangkan lima perusahaan lainnya yakni BBKA, BBNI, BBRI, BTPN, dan MAYA cenderung memberikan peran yang cukup besar dalam menanamkan modal bagi manajerial dari dalam perusahaannya. Dengan demikian pihak manajerial memiliki peran yang lebih besar dari mengawasi perusahaan.

Pada Tabel 4.3, nilai rata-rata rasio kepemilikan manajerial seluruh perusahaan perbankan tahun 2014-2018 adalah sebesar 0.194%. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi rata-rata perusahaan dalam rasio kepemilikan manajerial sebesar 0.285%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari jumlah kepemilikan manajerial relatif besar atau dapat dikatakan data semakin menyebar.

Tabel 4.4 Deskriptif Statistik Komite Audit (X4)

No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018	Max	Min	Avg
1	BBMD	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	BJTM	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.40
3	BSIM	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4	BBTN	4.00	5.00	7.00	3.00	7.00	7.00	3.00	5.20
5	BTPN	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.80
6	SDRA	3.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	3.00	4.40
7	BBKP	4.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	4.00	5.00
8	BBRI	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	5.60
9	AGRO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
10	BMRI	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
11	BBCA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
12	MAYA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
13	BBNI	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.60
14	NISP	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.60
15	INPC	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	6.00	4.00	5.40
16	BDMN	5.00	5.00	5.00	3.00	4.00	5.00	3.00	4.40
17	BNGA	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.80
	Max	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00
	Min	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Avg	4.06	4.18	4.24	3.94	4.24	4.59	3.41	4.13
	Std Dev	1.25	1.19	1.39	1.09	1.25	1.37	0.80	1.04

Keterangan:

a. 2014: Rasio Komite Audit tahun 2014

b. 2015: Rasio Komite Audit tahun 2015

c. 2016: Rasio Komite Audit tahun 2016

d. 2017: Rasio Komite Audit tahun 2017

e. 2018: Rasio Komite Audit tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa secara umum jumlah rata - rata

komite audit pada perusahaan perbankan periode 2014-2018 sebesar 4.13%. BMRI

memiliki jumlah rata-rata komite audit terbesar yaitu 6.00%, sedangkan BBMD,

BSIM, AGRO, BBCA, dan MAYA memiliki jumlah rata-rata komite audit terendah yaitu 3.00%. Pada tabel 4.4., nilai rata-rata nilai komite audit seluruh perusahaan perbankan tahun 2014-2018 adalah sebesar 4.13%. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi rata-rata perusahaan dalam nilai komite audit sebesar 1.04%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari nilai komite audit relatif kecil atau penyebaran data yang rendah dan normal.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, jumlah keseluruhan komite audit ialah paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari dewan komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Sehingga berdasarkan data deskriptif diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan perbankan pada penelitian ini telah memenuhi regulasi yang telah ditentukan secara keseluruhan.

Tabel 4.5 Deskriptif Statistik *Return on Equity* (Y)

No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018	Max	Min	Avg
1	BBMD	18.10	16.10	6.60	8.60	8.60	18.10	6.60	13.60
2	BJTM	2.47	2.07	2.39	2.25	2.01	2.47	2.07	2.31
3	BSIM	4.90	5.05	8.28	6.58	1.04	8.28	4.90	6.08
4	BBTN	9.14	13.35	13.69	13.98	11.78	13.69	9.14	12.06
5	BTPN	15.69	12.54	11.06	7.39	10.83	15.69	11.06	13.10
6	SDRA	3.54	6.41	7.02	7.18	8.21	7.02	3.54	5.66
7	BBKP	10.65	12.79	11.43	2.01	2.21	12.79	10.65	11.62
8	BBRI	24.85	22.51	17.89	17.39	17.68	24.85	17.89	21.75
9	AGRO	6.86	5.95	5.32	4.52	4.62	6.86	5.32	6.04
10	BMRI	19.36	17.37	9.18	12.38	13.81	19.36	9.18	15.30
11	BBCA	21.22	20.16	18.33	17.75	17.05	21.22	18.33	19.90
12	MAYA	15.27	14.22	11.63	7.91	4.05	15.27	11.63	13.71
13	BBNI	18.25	11.87	13.01	13.81	13.89	18.25	11.87	14.38

No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018	Max	Min	Avg
14	NISP	8.94	9.15	9.18	9.99	10.80	9.18	8.94	9.09
15	INPC	4.07	2.58	1.65	1.51	1.17	4.07	1.65	2.77
16	BDMN	7.94	7.05	7.43	9.52	9.49	7.94	7.05	7.47
17	BNGA	8.23	1.49	6.09	8.06	8.80	8.23	1.49	5.27
	Max	24.85	22.51	18.33	17.75	17.68	24.85	18.33	21.75
	Min	2.47	1.49	1.65	1.51	1.04	2.47	1.49	2.31
	Avg	11.73	10.63	9.42	8.87	8.59	12.55	8.31	10.59
	Std Dev	6.87	6.35	4.68	4.95	5.38	6.43	5.05	5.65

Keterangan:

- 2014: Rasio *Return on Equity* tahun 2014
- 2015: Rasio *Return on Equity* tahun 2015
- 2016: Rasio *Return on Equity* tahun 2016
- 2017: Rasio *Return on Equity* tahun 2017
- 2018: Rasio *Return on Equity* tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4.5., dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata rasio ROE pada perusahaan perbankan periode 2014-2018 sebesar 10.59%. BBRI memiliki rata-rata rasio ROE terbesar yaitu 21.75%, sedangkan BJTM memiliki rata-rata rasio ROE terendah yaitu 2.31%.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa rasio ROE tertinggi dimiliki oleh BBRI pada tahun 2014 sebesar 24.85%, sedangkan rasio ROE terendah dimiliki oleh INPC pada tahun 2018 sebesar 1.17%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan INPC pada tahun 2018 belum mampu untuk memperbaiki kinerjanya dilihat dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan mengalami penurunan. Berbeda dengan BBRI yang secara rata-rata selalu mengalami peningkatan selama tahun pengamatan, hal itu berarti BBRI

memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari perusahaan sampel lainnya dan menunjukkan performa terbaiknya selama 5 periode pengamatan.

Pada tabel 4.5., nilai rata-rata rasio ROE seluruh perusahaan perbankan tahun 2014-2018 adalah sebesar 10.59%. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi rata-rata perusahaan dalam nilai ROE sebesar 5.65%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari nilai ROE relatif kecil atau penyebaran data yang rendah dan normal. Artinya, perusahaan Perbankan memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dalam menghasilkan kinerja profitabilitas. Selama 5 periode pengamatan, secara umum perusahaan sudah dapat mengelola masing - masing perusahaannya dengan baik dikarenakan rata-rata kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba cukup tinggi yang dibuktikan dari nilai rata-rata ROE setiap tahun sebagian besar perusahaan berada diatas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan ROE dinilai cukup baik karena perusahaan mampu memaksimalkan modal untuk meningkatkan profitabilitas.

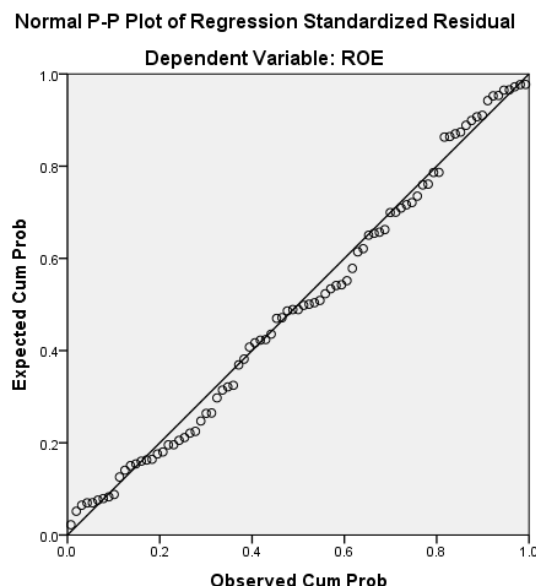
4.3 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa asumsi - asumsi yang diperlukan untuk dilakukannya analisis regresi linear berganda terpenuhi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

4.3.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual mengikuti distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan analisis

statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Tabel 4.6 dibawah:



Gambar 4.1 Distribusi Normal Pengujian Normalitas P-P Plot Regression

Tabel 4. 6 Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	
N	85	
Normal Parameters ^{a,b}	.0000000	,0000000
	5.27901178	4.57073741
	.085	.063
Most Extreme Differences	.064	.063
	-.085	-.057
Kolmogorov-Smirnov Z	.581	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.888	

Sumber: Ouput SPSS

Berdasarkan tabel diatas nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* yang diperoleh sebesar 0,581 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,888 . Dengan taraf signifikansi 5% , nilai *Sig.* lebih besar dari tingkat signifikansi sehingga residual dari model berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (indenpenden). Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Komisaris Independen	.541	1.850
Kepemilikan Institusional	.629	1.590
Kepemilikan Manajerial	.738	1.354
Komite Audit	.567	1.763

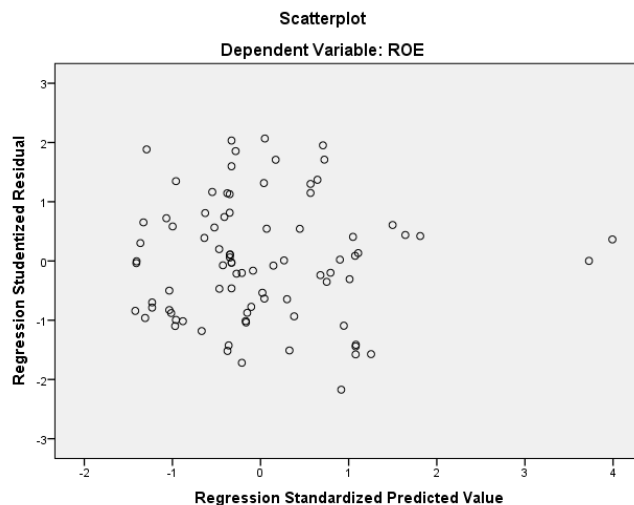
Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik heterokedastisitas antara prediksi variabel dependen dengan

variabel independen. Hasil dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Grafik Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat titik-titik tidak ada pola yang jelas dan letaknya menyebar diantar angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian, tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain menggunakan grafik penelitian ini juga menggunakan uji *Glejser* supaya hasil dari uji heteroskedastisitas lebih akurat. Uji *Glejser* dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan meregresikan nilai absolute residual (AbsRes) terhadap variabel independen. Hasil dari Uji *Glejser* dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.515	2.621		.960	.340
Komisaris Independen	.041	.041	.148	.989	.326
1 Kepemilikan Institusional	-.010	.026	-.051	-.370	.712
Kepemilikan Manajerial	-1.662	1.076	-.197	-1.545	.126
Komite Audit	-.007	.322	-.003	-.023	.982

a. Dependent Variable: absolute.residual

Sumber: Output SPSS

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai *Sig.* lebih besar dari nilai *alpha* (0.05). Hal ini menunjukan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, perhitungan statistik dengan analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan program komputer SPSS 16. Hasil dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
Konstan	-9.307	4.549	
Komisaris Independen	0.161	0.071	0.275
Kepemilikan Institusional	0.097	0.046	0.241
Kepemilikan Manajerial	5.316	1.867	0.297
Komite Audit	0.411	0.559	0.088

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -9.307 + 0.161 X_1 + 0.097 X_2 + 5.316 X_3 + 0.411 X_4$$

Dari model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. ROE akan meningkat untuk setiap tambahan X_1 (Komisaris Independen).

Jadi apabila Komisaris Independen mengalami peningkatan, maka ROE akan meningkat sebesar 0.161 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

2. ROE akan meningkat untuk setiap tambahan X_2 (Kepemilikan Institusional). Jadi apabila Kepemilikan Institusional mengalami peningkatan, maka ROE akan meningkat sebesar 0.097 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

3. ROE akan meningkat untuk setiap tambahan X_3 (Kepemilikan Manjerial). Jadi apabila Kepemilikan Manajerial mengalami peningkatan, maka ROE akan meningkat sebesar 5.316 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

4. ROE akan meningkat untuk setiap tambahan X_4 (Komite Audit). Jadi apabila Komite Audit mengalami peningkatan, maka ROE akan meningkat sebesar 0.411 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

4.5 Uji F (Uji *Goodness Of Fit Model*) dan Koefisien Determinasi (R^2)

4.5.1 Uji F (Uji *Goodness Of Fit Model*)

Uji F dilakukan untuk menguji hubungan signifikansi antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau simultan. Dalam penelitian ini, uji F membuktikan pengaruh variabel Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3) dan Komite Audit (X4) terhadap variabel Return Of Equity (ROE) (Y). Hasil dari uji F dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 4. 10 Hasil dari Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	968.363	4	242.091	11.036	.000
Residual	1,754.898	80	21.936		
Total	2,723.260	84			

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.8 nilai F hitung sebesar 11.036. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 4 : db residual = 80) adalah sebesar 2,486. Karena F hitung > F tabel yaitu $11.036 > 2,486$ atau nilai Sig. F ($0,000 < \alpha = 0.05$) maka model analisis regresi adalah signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3) dan Komite Audit (X4) berpengaruh terhadap variabel Return Of Equity (ROE) (Y).

4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4) terhadap variabel terikat (ROE) digunakan nilai R^2 , nilai R^2 seperti dalam Tabel

4.13 dibawah ini:

Tabel 4. 11 Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
0.596	0.356	0.323

Sumber: Output SPSS

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 4.6 diperoleh hasil *adjusted* R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0.323. Artinya bahwa 32.3 % variabel ROE akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4). Sedangkan sisanya 67.7% variabel ROE akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi (R) yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4) terhadap variabel ROE, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,596, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Komisaris Independen

(X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4) dengan ROE termasuk dalam kategori normal karena berada pada selang 0,40 – 0,599.

4.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah data terkumpul dan diolah. Uji hipotesis dilakukan untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

4.6.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Adapun hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 4.12

Tabel 4. 12 Hasil dari Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Komisaris Independen	2.250	1.990	0.027	Signfikan
Kepemilikan Institusional	2.127	1.990	0.036	Signfikan
Kepemilikan Manajerial	2.848	1.990	0.006	Signfikan
Komite Audit	0.735	1.990	0.465	Tidak Signfikan

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Return Of Equity (ROE)

Hipotesis:

H0 = Tidak ada pengaruh variabel Komisaris Independen terhadap Return Of Equity (ROE).

H1= Ada pengaruh variabel Komisaris Independen terhadap Return Of Equity (ROE).

$$H_0 = P = 0$$

$$H_1 = P \neq 0$$

Dasar Pengambilan Keputusan:

a. Tolak H_0 apabila nilai t hitung $> t$ tabel.

b. Terima H_0 apabila nilai t hitung $< t$ tabel.

Uji t antara X_1 (Komisaris Independen) dengan Y (ROE) menunjukkan t hitung =

2.250. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 80) adalah sebesar 1.990. Karena t

hitung $> t$ tabel yaitu $2.250 > 1.990$ atau $\text{sig. } t (0.027) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_1

(Komisaris Independen) terhadap ROE adalah signifikan pada α 5%. Hal ini

berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen dapat

mempengaruhi ROE secara signifikan.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Return Of Equity (ROE).

Hipotesis:

H_0 = Tidak ada pengaruh variabel Kepemilikan Institusional terhadap Return Of

Equity (ROE).

H_1 = Ada pengaruh variabel Kepemilikan Institusional terhadap Return Of Equity

(ROE).

$$H_0 = P = 0$$

$$H_1 = P \neq 0$$

Dasar Pengambilan Keputusan:

a. Tolak H_0 apabila nilai t hitung $> t$ tabel.

b. Terima H_0 apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$.

Uji t antara X_2 (Kepemilikan Institusional) dengan Y (ROE) menunjukkan $t_{hitung} = 2.127$. Sedangkan t_{tabel} ($\alpha = 0.05$; db residual = 80) adalah sebesar 1.990. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.127 > 1.990$ atau $\text{sig. } t(0,036) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_2 (Kepemilikan Institusional) terhadap ROE adalah signifikan pada α 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dapat mempengaruhi ROE secara signifikan

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Return Of Equity (ROE).

Hipotesis:

H_0 = Tidak ada pengaruh variabel Kepemilikan Manajerial terhadap Return Of Equity (ROE).

H_1 = Ada pengaruh variabel Kepemilikan Manajerial terhadap Return Of Equity (ROE).

$H_0 = P = 0$

$H_1 = P \neq 0$

Dasar Pengambilan Keputusan:

a. Tolak H_0 apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.

b. Terima H_0 apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$.

Uji t antara X_3 (Kepemilikan Manajerial) dengan Y (ROE) menunjukkan $t_{hitung} = 2.848$. Sedangkan t_{tabel} ($\alpha = 0.05$; db residual = 80) adalah sebesar 1.990. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.848 > 1.990$ atau $\text{sig. } t(0,006) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_3 (Kepemilikan Manajerial) terhadap ROE adalah signifikan pada α 5%. Hal ini

berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi ROE secara signifikan.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Return Of Equity (ROE).

Hipotesis:

H_0 = Tidak ada pengaruh variabel Komite Audit terhadap Return Of Equity (ROE).

H_1 = Ada pengaruh variabel Komite Audit terhadap Return Of Equity (ROE).

$H_0 = P = 0$

$H_1 = P \neq 0$

Dasar Pengambilan Keputusan:

a. Tolak H_0 apabila nilai t hitung $> t$ tabel.

b. Terima H_0 apabila nilai t hitung $< t$ tabel.

Uji t antara X_4 (Komite Audit) dengan Y (ROE) menunjukkan t hitung =

0.735. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 80) adalah sebesar 1.990. Karena t hitung $< t$ tabel yaitu $0.735 < 1.990$ atau $\text{sig. } t (0.465) > \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_4

(Komite Audit) terhadap ROE adalah tidak signifikan pada α 5% Hal ini berarti

H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak dapat mempengaruhi ROE secara signifikan.

4.7 Pembahasan Penelitian

4.7.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap ROE

Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif jumlah proporsi komisaris independen terhadap ROE, dan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil dari nilai signifikansi sebesar 0,027 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu $0,027 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan meningkatkan proporsi komisaris independen maka ROE akan meningkat secara signifikan. Semakin banyak proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perbankan di Indonesia, maka akan memberikan strategi dan pengawasan yang netral sehingga tata kelola perusahaan lebih baik karena fungsi pengendalian dilakukan secara independen dan mengarah pada profesional.

Penelitian ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa adanya komisaris independen dapat melindungi kepentingan *stakeholder* dalam meningkatkan pengawasan atas kinerja manajemen secara maksimal. Hal ini sesuai pada aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa komposisi dari dewan komisaris independen adalah wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Hal ini dibuktikan melalui Tabel 4.1 statistik deskriptif yakni seluruh perusahaan memiliki jumlah komisaris independen di atas 30% selama kurun tahun

2014-2018 sehingga pengawasan atas kinerja manajemen perusahaan yang dilakukan oleh komisaris independen berjalan secara maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yemima (2016) dan Eka Mustikasari (2015) yang menyatakan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap ROE. Pelaksanaan Good Corporate Governance oleh komisaris independen dapat meningkatkan profitabilitas yang diukur dengan ROE. Eka Mustikasari (2015) menyatakan bahwa dengan ditunjuknya komisaris independen pada RUPS, akan secara langsung memberikan pengawasan terhadap direksi dalam pelaksanaan kebijakan - kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya perusahaan dilakukan agar dapat berjalan efektif, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance. Semakin besar jumlah komisaris independen maka keputusan yang dibuat dewan komisaris semakin objektif dan lebih mengutamakan kepada kepentingan perusahaan dan mampu melindungi *stakeholder* perusahaan.

4.7.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ROE

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif jumlah kepemilikan institusional terhadap ROE, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil dari nilai signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu $0,036 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan meningkatkan kepemilikan institusional maka ROE akan meningkat secara signifikan. Semakin banyak jumlah kepemilikan institusional dalam suatu perbankan di Indonesia, maka akan memberikan pengawasan yang berasal dari luar perusahaan secara objektif dan memonitor kinerja manajemen perusahaan sehingga tata kelola perusahaan lebih baik karena dapat meminimalisir konflik agensi sehingga mengurangi biaya agensi dan berimplikasi positif terhadap laba perusahaan. Pada tabel 4.2 deskriptif statistik dapat dilihat bahwa lebih banyak perusahaan yang membuka peluang bagi institusi dari luar perusahaan untuk menginvestasikan sahamnya sehingga pihak institusi memiliki peran yang lebih besar dalam memonitor perusahaan.

Peran kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan dan memonitoring kinerja manajemen sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Hal ini sesuai dengan teori agensi bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan salah satunya yaitu kepemilikan institusional dapat meminimalisir konflik agensi dengan begitu kemungkinan mampu mengurangi biaya agensi (*agency cost*) yang ditimbulkan dan akhirnya berimplikasi positif terhadap profitabilitas perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizky Arifani (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ROE. Dicky Kusnadi (2018) juga menyatakan bahwa pihak

institusional selaku pemilik perusahaan dapat menjadi *controller* terhadap manajemen perusahaan untuk mengawasi tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh manajemen sehingga antara pihak manajemen dan institusional dapat bekerja sama guna mengembangkan perusahaan.

4.7.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap ROE

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif jumlah kepemilikan manajerial terhadap ROE, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil dari nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu $0,006 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan meningkatkan kepemilikan manajerial maka ROE akan meningkat secara signifikan. Penerapan kepemilikan manajerial yaitu untuk membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan agar dapat memotivasi manajer dalam melakukan tindakan guna meningkatkan kinerja perusahaan yang belum dapat berjalan efektif. Adanya saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan membuat pihak manajemen merasa ikut memiliki perusahaan karena keuntungan dari menanam saham dapat dinikmati oleh pihak manajemen menyebabkan pihak manajemen termotivasi dan kinerja manajemen meningkat sehingga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Manajer akan bertindak terhindar dari tindakan *opportunistic* sehingga tata kelola perusahaan lebih baik karena pengawasan dan pengendalian perusahaan sesuai dengan aturan dan ketentuan

perusahaan dengan begitu mendorong peningkatan kinerjanya sehingga meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 4.3 deskriptif statistik bahwa perusahaan memberikan peluang bagi manajer untuk menanamkan saham pada perusahaan tempat mereka bekerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khansa Shabibah (2017) menyatakan bahwa Kepemilikan saham manajerial merupakan kompensasi untuk para manajer atas kinerja keuangan perusahaan yang meningkat. Apabila kinerja keuangan meningkat, maka kompensasi yang berdasarkan aset perusahaan juga akan meningkat. Sehingga pihak manajemen akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memakmurkan perusahaannya.

Hasil penelitian ini mendukung teori Jensen dan Meckling (1976) yang mengatakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah keagenan yaitu dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Perusahaan memberikan bagian sahamnya kepada manajer sehingga konflik kepentingan antara pemilik dan agen dapat dihindarkan, dengan berkurangnya konflik kepentingan maka akan terjalin kesinambungan dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer perusahaan dapat meminimalisir tindakan *opportunistic* yang dapat merugikan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan manajer termotivasi dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya sehingga meningkatkan laba perusahaan. Jika laba perusahaan meningkat maka manajer juga mendapat keuntungan berupa deviden dari hasil investasi yang dilakukan.

4.7.4 Pengaruh Komite Audit terhadap ROE

Hipotesis keempat menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif secara bersama antara jumlah komite audit dengan variabel lainnya terhadap ROE. Tetapi, hasil dari uji parsial yaitu nilai signifikansi sebesar 0,465 lebih besar dari alpha yang dipakai yaitu $0,465 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota komite audit secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan ROE. Semakin banyak jumlah anggota komite audit pada perusahaan perbankan di Indonesia, tidak mempengaruhi ROE secara signifikan pada perusahaan perbankan di Indonesia. Perusahaan yang sudah terdaftar di BEI atau *go public* secara otomatis harus menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit karena hal tersebut sudah merupakan standar bagi perusahaan yang *go public* untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan. Komite audit menyesuaikan dan memperbaiki laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi sebelum di publikasikan. Maka dari itu perusahaan perbankan yang memiliki jumlah komite audit baik sedikit maupun banyak tetap harus mempublikasikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sehingga jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE perusahaan perbankan di Indonesia.

Pada tabel 4.4 deskriptif statistik dapat diketahui bahwa jumlah komite audit pada perusahaan perbankan yang menjadi sampel telah memenuhi syarat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu jumlah keseluruhan komite audit ialah paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari dewan komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Walaupun jumlah komite audit telah memenuhi syarat

yang telah ditentukan, namun tetap tidak memberikan pengaruh terhadap ROE, hal ini dikarenakan jumlah komite audit baik sedikit maupun banyak tetap harus mempublikasikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khansa Shabibah (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE). Komite audit merupakan suatu kelompok yang diangkat oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Namun pada kenyataannya, komite audit yang telah diangkat oleh dewan komisaris belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal tersebut akan menyebabkan tugas komite audit dalam mengawasi jalannya perusahaan kurang efektif. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan yang kurang efektif akan membuat kinerja keuangan yang ada di perusahaan tidak mengalami peningkatan. Dewan komisaris harus dapat bertindak tegas terhadap anggota komite audit sehingga tugas – tugas yang dibebankan kepada komite audit serta pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan.

4.8 Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROE pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan variabel komite audit berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Implikasi dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Proporsi Komisaris Independen menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan melalui ROE. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penambahan proporsi komisaris independen akan meningkatkan ROE perusahaan secara signifikan. Dalam penelitian ini pengaruh komisaris independen diukur dengan perbandingan komisaris independen dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris. Jumlah anggota komisaris independen telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 yang mensyaratkan bagi perusahaan yang memiliki dewan komisaris paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris. Peran pemegang saham yang kuat dimana anggota komisaris independen diangkat pada rapat umum pemegang saham dapat mempengaruhi komisaris independen dalam memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan.

2. Kepemilikan institusional menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kenaikan jumlah kepemilikan institusional akan meningkatkan nilai ROE. Kepemilikan institusional terdiri dari badan/institusi dari luar perusahaan seperti bank, asuransi, perusahaan investasi, dll. pihak kepemilikan institusi dapat memberikan pengawasan dan memonitor jalannya kinerja manajemen perusahaan agar bekerja sesuai tugas dan fungsinya maka dengan begitu dapat meminimalisir konflik agensi sehingga mengurangi biaya agensi sehingga berimplikasi positif terhadap profitabilitas perusahaan.

3. Kepemilikan manajerial menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pertambahan kepemilikan manajerial akan meningkatkan ROE perusahaan secara signifikan. Dengan adanya manajer yang menanamkan saham di perusahaan maka manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar mendapatkan pengembalian investasi yang tinggi. Kepemilikan manajer pada perusahaan dapat mengurangi konflik keagenan dan tindakan *opportunistic* karena manajer mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan.

4. Komite audit menunjukkan hasil yang positif secara bersama – sama dengan variabel lainnya, tetapi komite audit secara parsial (individual) tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia yang diukur dengan ROE. Perusahaan yang sudah terdaftar di BEI atau *go public* secara otomatis harus menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit sesuai

dengan standar akuntansi karena hal tersebut sudah merupakan standar bagi perusahaan yang *go public* untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu perusahaan perbankan yang memiliki jumlah komite audit baik sedikit maupun banyak tetap harus mempublikasikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sehingga jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE perusahaan perbankan di Indonesia.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dimensi GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel Proporsi Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4), sedangkan variabel terikat diukur dengan variabel *Return On Equity* (Y). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proporsi Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin meningkatkan kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya kepemilikan komisaris independen dapat memberikan strategi dan pengawasan yang netral sehingga tata kelola perusahaan lebih baik karena fungsi pengendalian dilakukan secara independen dan mengarah pada profesional. Dengan begitu kepercayaan investor akan meningkat untuk menanamkan modalnya diperusahaan karena dianggap mampu melindungi *stakeholder* perusahaan.

2. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besarnya kepemilikan institusional maka akan meningkatkan kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya kepemilikan institusi dari luar perusahaan dapat memberikan pengawasan secara objektif dan memonitor kinerja manajemen perusahaan sehingga tata kelola perusahaan lebih baik karena dapat meminimalisir konflik agensi sehingga mengurangi biaya agensi sehingga berimplikasi positif terhadap profitabilitas perusahaan.

3. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Manajer yang memiliki saham pada perusahaan akan bertindak sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan, peran kepemilikan manajerial dalam perusahaan untuk membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan agar dapat memotivasi manajer dalam melakukan tindakan guna meningkatkan kinerja perusahaan yang belum dapat berjalan efektif. Pihak manajemen dan juga pemegang saham sehingga dapat meminimalisir tindakan *opportunistic* dari pihak manajemen, dengan begitu dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Dengan hasil yang signifikan, investor akan menggunakan informasi mengenai

kepemilikan manajerial dalam melakukan penilaian investasi.

4. Komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Komite audit tidak membuat kinerja keuangan meningkat secara signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena jumlah komite audit baik sedikit maupun banyak pada perusahaan tetap harus mempublikasikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi karena hal tersebut merupakan standar bagi perusahaan yang *go public*. Sehingga jumlah dari komite audit pada perusahaan perbankan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak-pihak lain sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan perbankan, harus memperhatikan implementasi *Good Corporate Governance* didalam perusahaannya karena GCG merupakan indikator untuk menilai kesehatan bank. Maka perusahaan perbankan diharapkan mampu mengoptimalkan implementasi *Good Corporate Governance* pada perusahaan perbankan.

2. Bagi Investor

Bagi calon investor untuk dapat memperhatikan implementasi *Good Corporate Governance* sebagai gambaran kondisi kinerja perusahaan perusahaan perbankan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dimana investor akan menanamkan modalnya di perusahaan perbankan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti selanjutnya yang akan menggunakan dimensi *Good Corporate Governance* dapat menambahkan variabel lain yang akan diteliti sehingga hasil penelitian dapat lebih mendalam dan lebih jelas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifani, Rizky. 2013. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Arsita Putri Winanda. 2009. Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Asian Corporate Governance Association and CLSA Limited. 2018. Hard decisions Special report December 2018 Asia faces tough choices in CG reform, Hongkong.
- Brigham, F. Eugene dan Joel F. Houston. 2017. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Edisi Kesebelas, Terjemahan oleh Ali Akbar Yulianto. Jakarta: Salemba Empat.
- Burhan Bungin. 2013. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Daniri. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: PT Ray Indonesia.
- Darwis, H. 2009. *Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, pp. 418 - 430.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP). 2011. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP. 2011. Bank Indonesia

Faisal, 2005. 'Anilisis Agency Costs, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance'. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 8 No. 2, pp. 175-190.

FCGI. 2012. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan): Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*. Jakarta.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance*. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Hastuti, T.D. 2005. Hubungan Antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan. Indonesia.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan. 2012.

Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. 2004. Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. Jakarta, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of financial economics*, 58(1), 3-27.

Manahan P. Tampubolon. 2013. *Manajemen Keuangan (Finance Management)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. 2017. *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach* (10th ed). United States of America, New York: McGraw-Hill Education.

Mustikasari, Eka. 2015. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2013)*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 / POJK.44/2014 perihal Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit.

Purwantini, V.T. 2011. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di*



Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan, STIE
AUB, Surakarta.

Rakhma, Sakina 2016, Menkeu: Ketergantungan yang Besar pada Perbankan Tidak
Sehat, diakses pada 8 Maret
2020, <https://money.kompas.com/read/2016/09/19/152436026/menkeu.ketergantungan.yang.besar.pada.perbankan.tidak.sehat>.

Sabrinna, A. I. 2010. 'Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur
Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan'. Skripsi. Universitas
Diponegoro. Semarang.

Santoso, H. R. I. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Direktur,
Jumlah Komite Audit, Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan
Saham Manajemen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi*, 23-334.

Santoso, Singgih. 2015. Mengenal SPSS 22. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Shabibah, Khansa. 2017. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja
Keuangan Perbankan (Studi Pada Perbankan Yang Tercatat di Bursa
Efek Indonesia Periode 2013-2015)*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
Malang.

Solomon, J. D. A. S. 2004. *Corporate Governance and Accountability*. England, John
Wiley & Sons Ltd.

Stiles, P dan Taylor. 2001. *Boards at Work: How Directors View Their Role and
Responsibilities*. Oxford University Press, Oxford.

Sugiarto. 2009. *Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan & Informasi Asimetri*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sulistiyowati dan Fidiana. 2017. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 6. pp 121 – 137

Susilawati, R. A. E. 2007. Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Agency Theory. *Modernisasi* 3(2), 86-102.

Sutrisno. 2012. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Edisi 8. Ekonisia, Yogyakarta.

Tertius, Melia Agustina dan Yulius Jogi Christiawan. 2015. Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Persahaan pada Sektor Keuangan. *Business Accounting Review*, Vol.3, No.1, pp. 223 – 232.

Thesarani, Nurul Juita. 2016. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit Terhadap Struktur Modal Perusahaan. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 2013, Diakses pada 8 Februari 2020,

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang->

perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998.aspx

Wida, N. P. 2014. Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Pada Nilai Perusahaan. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 9, pp 575-590.

Yemima. 2016. *Pengaruh Mekanisme Internal Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.

Yudistira, Galvin. 2017. OJK Larang Kantor Kas BTN Buka Rekening. diakses pada tanggal 15 Maret 2020, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/03/22/ojk-larang-kantor-kas-btnbuka-rekening>.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Uji Statistik Deskriptif

1. Deskripsi Variabel Proporsi Komisaris Independen dalam (rasio)

No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018	Max	Min	Avg
1	AGRO	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	50.00	52.00
2	BBCA	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
3	BBKP	57.14	50.00	57.00	50.00	50.00	57.14	50.00	52.83
4	BBMD	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5	BBNI	50.00	63.00	63.00	50.00	67.00	67.00	50.00	58.60
6	BBRI	83.00	82.50	70.00	76.36	70.00	83.00	70.00	76.37
7	BBTN	50.00	57.00	57.00	48.00	56.00	57.00	48.00	53.60
8	BDMN	50.00	57.00	57.00	40.00	50.00	57.00	40.00	50.80
9	BJTM	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	40.00	42.00
10	BMRI	67.00	60.00	60.00	60.00	60.00	67.00	60.00	61.40
11	BNGA	50.00	50.00	50.00	50.00	57.00	57.00	50.00	51.40
12	BSIM	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
13	BTPN	43.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	43.00	54.60
14	INPC	50.00	50.00	60.00	50.00	43.00	60.00	43.00	50.60
15	MAYA	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	60.00	50.00	56.00
16	NISP	50.00	50.00	50.00	63.00	63.00	63.00	50.00	55.20
17	SDRA	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
	Max	83.00	82.50	75.00	76.36	75.00	83.00	75.00	76.37
	Min	40.00	40.00	40.00	40.00	43.00	47.00	40.00	42.00
	Avg	55.42	55.97	56.82	54.08	56.35	60.60	51.53	55.73
	Std Dev	11.22	10.46	8.51	10.36	8.80	8.87	9.67	8.84

2. Deskripsi Variabel Kepemilikan Institusional dalam (rasio)

No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018	Max	Min	Avg
1	AGRO	94.45	96.33	94.31	92.80	93.43	96.33	92.80	94.26
2	BBCA	97.16	97.15	97.15	94.94	94.94	97.16	94.94	96.27
3	BBKP	59.40	59.40	59.40	59.40	65.73	65.73	59.40	60.67
4	BBMD	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44
5	BBNI	96.59	95.24	95.64	96.99	96.26	96.99	95.24	96.14
6	BBRI	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75
7	BBTN	60.13	60.04	60.00	60.00	60.00	60.13	60.00	60.03
8	BDMN	74.16	74.18	73.95	79.03	73.83	79.03	73.83	75.03
9	BJTM	75.00	75.00	79.85	79.70	79.68	79.85	75.00	77.85
10	BMRI	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
11	BNGA	81.92	81.92	81.48	81.48	81.48	81.92	81.48	81.66
12	BSIM	56.00	55.55	58.62	58.83	60.71	60.71	55.55	57.94
13	BTPN	66.88	69.38	69.38	61.00	60.91	69.38	60.91	65.51
14	INPC	51.17	51.17	58.05	58.05	58.05	58.05	51.17	55.30
15	MAYA	85.49	87.57	88.14	87.03	87.02	88.14	85.49	87.05
16	NISP	85.08	85.08	85.08	85.08	85.08	85.08	85.08	85.08
17	SDRA	80.08	80.08	80.08	84.55	84.55	84.55	80.08	81.87
	Max	97.16	97.15	97.15	96.99	96.26	97.16	95.24	96.27
	Min	51.17	51.17	58.05	58.05	58.05	58.05	51.17	55.30
	Avg	76.45	76.72	77.49	77.36	77.52	78.78	75.72	77.11
	Std Dev	15.03	15.11	14.09	14.37	13.82	13.79	14.96	14.39

3. Deskripsi Variabel Kepemilikan Manajerial dalam (rasio)

No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018	Max	Min	Avg
1	AGRO	0.08	0.03	0.04	0.06	0.05	0.08	0.03	0.05
2	BBCA	0.24	0.25	0.20	0.19	0.19	0.25	0.19	0.21
3	BBKP	0.15	0.01	0.01	0.01	0.00	0.15	0.00	0.03
4	BBMD	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
5	BBNI	0.21	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.26
6	BBRI	1.60	1.60	0.60	0.30	0.40	1.60	0.30	0.90
7	BBTN	0.05	0.05	0.00	0.00	0.01	0.05	0.00	0.02
8	BDMN	0.18	0.17	0.16	0.04	0.03	0.18	0.03	0.11
9	BJTM	0.01	0.01	0.06	0.07	0.10	0.10	0.01	0.05
10	BMRI	0.05	0.05	0.01	0.00	0.00	0.05	0.00	0.02
11	BNGA	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.00	0.01

No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018	Max	Min	Avg
12	BSIM	0.03	0.04	0.03	0.00	0.00	0.04	0.00	0.02
13	BTPN	0.80	0.64	0.65	1.17	0.85	1.17	0.64	0.82
14	INPC	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03
15	MAYA	0.67	0.67	0.45	0.46	0.48	0.67	0.45	0.54
16	NISP	0.01	0.010	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
17	SDRA	0.23	0.18	0.18	0.10	0.09	0.23	0.09	0.15
	Max	1.60	1.60	0.65	1.17	0.85	1.60	0.64	0.90
	Min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	Avg	0.25	0.23	0.16	0.16	0.14	0.29	0.11	0.19
	Std Dev	0.41	0.40	0.21	0.29	0.22	0.44	0.18	0.28

4. Deskripsi Variabel Komite Audit dalam (jumlah)

No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018	Max	Min	Avg
1	BBMD	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	BJTM	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.40
3	BSIM	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4	BBTN	4.00	5.00	7.00	3.00	7.00	7.00	3.00	5.20
5	BTPN	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.80
6	SDRA	3.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	3.00	4.40
7	BBKP	4.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	4.00	5.00
8	BBRI	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	5.60
9	AGRO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
10	BMRI	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
11	BBCA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
12	MAYA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
13	BBNI	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.60
14	NISP	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.60
15	INPC	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	6.00	4.00	5.40
16	BDMN	5.00	5.00	5.00	3.00	4.00	5.00	3.00	4.40
17	BNGA	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.80
	Max	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00
	Min	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Avg	4.06	4.18	4.24	3.94	4.24	4.59	3.41	4.13
	Std Dev	1.25	1.19	1.39	1.09	1.25	1.37	0.80	1.04

5. Deskripsi Variabel Return on Equity dalam (rasio)

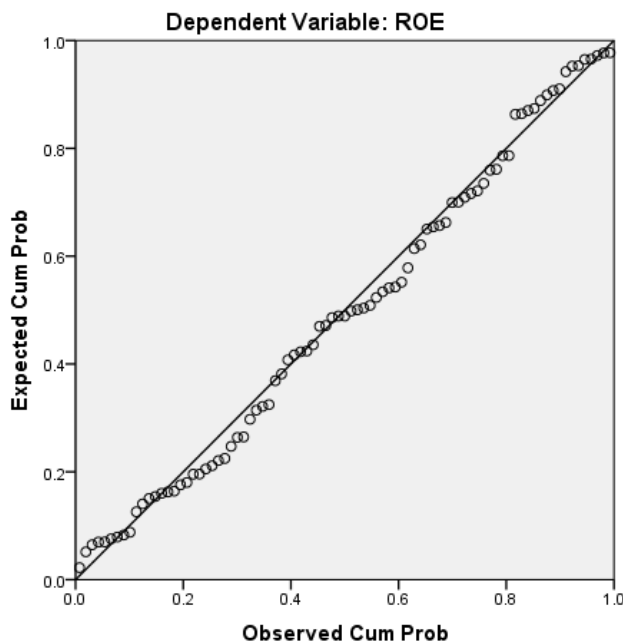
No	Emiten	2014	2015	2016	2017	2018	Max	Min	Avg
1	BBMD	18.10	16.10	6.60	8.60	8.60	18.10	6.60	13.60
2	BJTM	2.47	2.07	2.39	2.25	2.01	2.47	2.07	2.31
3	BSIM	4.90	5.05	8.28	6.58	1.04	8.28	4.90	6.08
4	BBTN	9.14	13.35	13.69	13.98	11.78	13.69	9.14	12.06
5	BTPN	15.69	12.54	11.06	7.39	10.83	15.69	11.06	13.10
6	SDRA	3.54	6.41	7.02	7.18	8.21	7.02	3.54	5.66
7	BBKP	10.65	12.79	11.43	2.01	2.21	12.79	10.65	11.62
8	BBRI	24.85	22.51	17.89	17.39	17.68	24.85	17.89	21.75
9	AGRO	6.86	5.95	5.32	4.52	4.62	6.86	5.32	6.04
10	BMRI	19.36	17.37	9.18	12.38	13.81	19.36	9.18	15.30
11	BBCA	21.22	20.16	18.33	17.75	17.05	21.22	18.33	19.90
12	MAYA	15.27	14.22	11.63	7.91	4.05	15.27	11.63	13.71
13	BBNI	18.25	11.87	13.01	13.81	13.89	18.25	11.87	14.38
14	NISP	8.94	9.15	9.18	9.99	10.80	9.18	8.94	9.09
15	INPC	4.07	2.58	1.65	1.51	1.17	4.07	1.65	2.77
16	BDMN	7.94	7.05	7.43	9.52	9.49	7.94	7.05	7.47
17	BNGA	8.23	1.49	6.09	8.06	8.80	8.23	1.49	5.27
	Max	24.85	22.51	18.33	17.75	17.68	24.85	18.33	21.75
	Min	2.47	1.49	1.65	1.51	1.04	2.47	1.49	2.31
	Avg	11.73	10.63	9.42	8.87	8.59	12.55	8.31	10.59
	Std Dev	6.87	6.35	4.68	4.95	5.38	6.43	5.05	5.65

Lampiran 2: Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



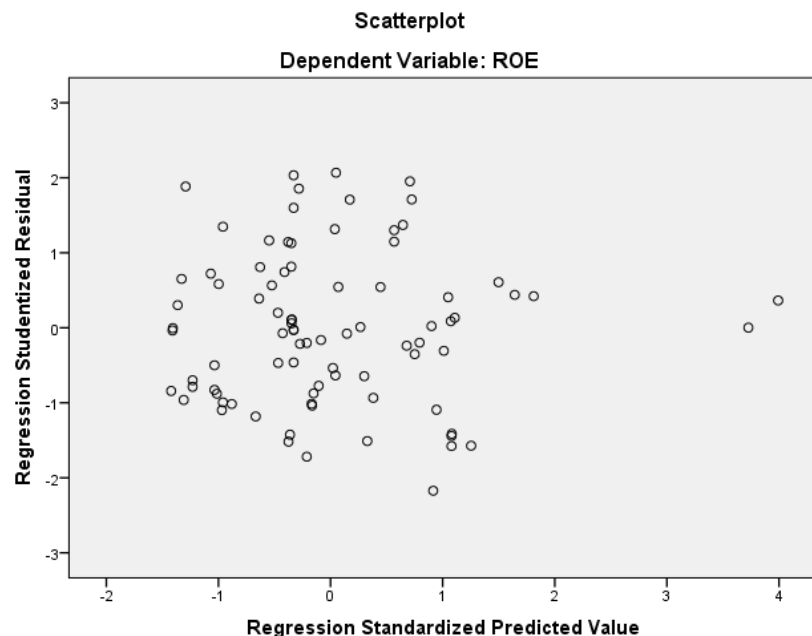
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.57073741
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.063
	Negative	-.057
Kolmogorov-Smirnov Z		.581
Asymp. Sig. (2-tailed)		.888

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Heteroskedastisitas



3. Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.515	2.621		.960	.340
Komisaris Independen	.041	.041	.148	.989	.326
Kepemilikan	-.010	.026	-.051	-.370	.712
1 Institusional					
Kepemilikan	-1.662	1.076	-.197	-1.545	.126
Manajerial					
Komite Audit	-.007	.322	-.003	-.023	.982

a. Dependent Variable: absolute.residual

4. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-9.307	4.549		-2.046	.044		
Komisaris Independen	.161	.071	.275	2.250	.027	.541	1.850
Kepemilikan Institusional	.097	.046	.241	2.127	.036	.629	1.590
Kepemilikan Manajerial	5.316	1.867	.297	2.848	.006	.738	1.354
Komite Audit	.411	.559	.088	.735	.465	.567	1.763

a. Dependent Variable: ROE

Lampiran 3 : Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Uji F

1. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	968.363	4	242.091	11.036	.000 ^b
Residual	1,754.898	80	21.936		
Total	2,723.260	84			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen

2. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.596 ^a	.356	.323	4.68361

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen

Lampiran 5 : Hasil Uji Hipotesis melalui Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-9.307	4.549		-2.046	.044
1	Komisaris Independen	.161	.071	.275	.2250
	Kepemilikan Institusional	.097	.046	.241	.2127
	Kepemilikan Manajerial	5.316	1.867	.297	.2848
	Komite Audit	.411	.559	.088	.735

a. Dependent Variable: ROE



Lampiran 4 : Data Mentah

No	Emiten	Tahun	Komisaris Independen	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Manajerial	Komite Audit	ROE
1	AGRO	2014	60.00	94.45	0.80500000	3	6.86
		2015	50.00	96.33	0.37500000	3	5.95
		2016	50.00	94.31	0.45000000	3	5.32
		2017	75.00	92.80	0.06400000	3	4.52
		2018	50.00	93.43	0.05000000	3	4.62
2	BBCA	2014	60.00	47.16	0.24000000	3	21.22
		2015	60.00	47.15	0.25000000	3	20.16
		2016	60.00	47.15	0.20000000	3	18.33
		2017	60.00	54.94	0.19000000	3	17.75
		2018	60.00	54.94	0.19000000	3	17.05
3	BBKP	2014	57.14	59.40	0.15000000	4	10.65
		2015	50.00	59.40	0.01000000	5	12.79
		2016	57.00	59.40	0.01000000	5	11.43
		2017	57.00	59.40	0.01000000	5	2.01
		2018	50.00	65.73	0.00372030	6	2.21
4	BBMD	2014	50.00	89.44	0.02000000	3	18.10
		2015	50.00	89.44	0.02000000	3	16.10
		2016	50.00	89.44	0.02000000	3	6.60
		2017	50.00	89.44	0.02000000	3	8.60
		2018	50.00	89.44	0.02000000	3	8.60
5	BBNI	2014	50.00	96.59	0.21000000	3	18.25
		2015	63.00	95.24	0.00003000	4	11.87
		2016	63.00	95.64	0.00003000	3	13.01
		2017	50.00	96.99	0.00003000	4	13.81
		2018	67.00	96.26	0.00002000	4	13.89
6	BBRI	2014	63.00	56.75	0.00600000	6	24.85
		2015	62.50	56.75	0.00600000	4	22.51
		2016	40.00	56.75	0.00600000	6	17.89
		2017	36.36	56.75	0.00300000	6	17.39
		2018	40.00	56.75	0.00400000	6	17.68
7	BBTN	2014	50.00	60.13	0.05000000	4	9.14
		2015	57.00	60.04	0.05000000	5	13.35
		2016	57.00	60.00	0.00440000	7	13.69
		2017	38.00	60.00	0.00150000	3	13.98
		2018	56.00	60.00	0.01387000	7	11.78
8	BDMN	2014	50.00	74.16	0.18000000	5	7.94
		2015	57.00	74.18	0.17000000	5	7.05



9	BJTM	2016	57.00	73.95	0.16000000	5	7.43
		2017	40.00	79.03	0.04000000	3	9.52
		2018	50.00	73.83	0.03000000	4	9.49
		2014	40.00	80.00	0.01000000	3	2.47
		2015	40.00	80.00	0.01000000	3	2.07
10	BMRI	2016	40.00	79.85	0.06000000	3	2.39
		2017	40.00	79.70	0.07000000	4	2.25
		2018	50.00	79.68	0.10000000	4	2.01
		2014	57.00	60.00	0.05200000	6	19.36
		2015	50.00	60.00	0.05200000	6	17.37
11	BNGA	2016	50.00	60.00	0.01200000	6	9.18
		2017	50.00	60.00	0.00880000	6	12.38
		2018	50.00	60.00	0.00900000	6	13.81
		2014	50.00	96.92	0.00000005	6	8.23
		2015	50.00	96.92	0.00000005	6	1.49
12	BSIM	2016	50.00	91.48	0.00006000	4	6.09
		2017	50.00	91.48	0.02500000	4	8.06
		2018	57.00	91.48	0.03200000	4	8.80
		2014	67.00	56.00	0.03000000	3	4.90
		2015	67.00	55.55	0.04000000	3	5.05
13	BTPN	2016	67.00	58.62	0.03400000	3	8.28
		2017	67.00	58.83	0.00800000	3	6.58
		2018	67.00	60.71	0.00800000	3	1.04
		2014	43.00	66.88	0.80000000	4	15.69
		2015	50.00	69.38	0.64000000	3	12.54
14	INPC	2016	60.00	69.38	0.65000000	4	11.06
		2017	60.00	61.00	1.17000000	4	7.39
		2018	60.00	60.91	0.85000000	4	10.83
		2014	50.00	51.17	3.44000000	6	4.07
		2015	50.00	51.17	3.44000000	6	2.58
15	MAYA	2016	60.00	58.05	2.85000000	6	1.65
		2017	50.00	58.05	2.85000000	5	1.51
		2018	43.00	58.05	2.86000000	4	1.17
		2014	60.00	85.49	0.67000000	3	15.27
		2015	40.00	87.57	0.67000000	3	14.22
16	NISP	2016	40.00	88.14	4.59000000	3	11.63
		2017	50.00	87.03	4.66000000	3	7.91
		2018	50.00	87.02	4.84000000	3	4.05
		2014	50.00	85.08	0.01000000	4	8.94
		2015	50.00	85.08	0.01000000	4	9.15
		2016	50.00	85.08	0.01000000	3	9.18

17	SDRA	2017	63.00	85.08	0.01000000	3	9.99
		2018	63.00	85.08	0.01000000	4	10.80
		2014	75.00	80.08	0.23000000	3	3.54
		2015	75.00	80.08	0.18000000	5	6.41
		2016	75.00	80.08	0.18000000	5	7.02
		2017	75.00	84.55	0.10000000	5	7.18
		2018	75.00	84.55	0.09000000	4	8.21

